

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DEWAN PENGAWAS

RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK



LAPORAN PENGAWASAN TAHUN 2021

Alamat : Jalan Simpang Rumbio - Kota Solok Prov Sumbar

/Tlp; 0755-20827/Fax.0755-20003/E-mail; rsudsolok@yahoo.co.id

Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Taufik dan Hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan laporan dewan pengawas di Masa Pandemi Covid 19 pada tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan lancar sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan pengawasan di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok Tahun 2021

Laporan Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Natsir Solok ini disusun untuk menginformasikan capaian kinerja yang telah dicapai RSUD M.Natsir Solok secara transparan dan akuntabel pada tahun 2020.

Tahun 2021 merupakan tahun ketujuh bagi RSUD M.Natsir Solok dalam pelaksanaan pola pengelolaan keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah , dimana pada tahun ini dilakukan juga dilakukan revisi RENSTRA BISNIS yang dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu;

1. Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021
2. Adanya perubahan visi dan misi RSUD M.Natsir Solok, sebagai syarat untuk memenuhi pengurusan izin rumah sakit pendidikan
3. Awal penerapan rumah sakit pendidikan sehingga dengan itu ada perubahan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RSUD M.Natsir solok pada tahun 2021 ini

Mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok, dirasakan bahan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan . Untuk itu diharapkan masukan , kritikan dan saran dari semua pihak bagi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan, terima kasih

Solok, Januari 2022
Dewan Pengawas BLUD
RS M.Natsir Solok
Ketua

Hansastri,SE,AK,MM,CFrA

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok adalah salah satu upaya mendorong tata kelola pengelolaan rumah sakit yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian kinerja ini dilakukan secara terukur sehingga bisa dijadikan pembelajaran bagi instansi untuk terus meningkatkan kinerjanya pada tahun berikutnya. Tahun 2020 ini merupakan awal Pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap pengelolaan BLUD RSUD M.Natsir Solok. Tahun 2021 ini juga merupakan tahun keenam dari pelaksanaan Rencana Strategis RSUD M. NATSIR SOLOK Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 antara Direktur RSUD Solok dengan Gubernur Sumatera Barat. Penyusunan Laporan Dewan pengawas Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan masukan kepada Kepala daerah / Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan secara umum memberikan penjelasan kepada publik terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan dan upaya untuk memberikan laporan secara tertulis mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021.

Laporan ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan pada tahun 2021 telah berhasil dicapai. Disamping itu laporan pengawas juga bertujuan untuk menjabarkan hasil capaian kinerja pelayanan kesehatan dari masing-masing unit yang berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Solok baik dari luar pelayanan extramural seperti pelayanan rujukan maupun pelaksanaan RSB, RBA dan pelayanan kesehatan lainnya

Program dan kegiatan RSUD SOLOK Tahun 2021 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra RSUD SOLOK Tahun 2016 – 2021 (revisi), serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan urusan kesehatan. Isu-isu tersebut antara lain sebagai sebuah institusi kesehatan, rumah sakit bertugas untuk memberikan pelayanan, meliputi tindakan preventif ,kuratif , rehabilitatif dan promotif. Untuk menghadapi era global, pihak manajemen rumah sakit,sudah seharusnya meninjau kembali sistem yang selama ini digunakan, untuk mampu bersaing dan berkembang dalam persaingan yang ketat di tingkat internasional, karena lingkungan global telah menciptakan lingkungan bisnis termasuk rumah sakit, yang tidak hanya dipandang sebagai usaha sosial semata, namun sudah sebagai usaha bisnis yang bersifat sosio ekonomi.

Rumah sakit saat ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu dengan ditunjang oleh standar profesi yang tinggi serta sistem pelayanan yang prima dan tarif yang bersaing,disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat , makin banyaknya pilihan untuk berobat dan disisi lain ancaman tuntutan hukum terhadap adanya dugaan malpraktek,oleh karena itu perlu pembenahan disegala bidang disamping meningkatkan efisiensi dan efektifitas Guna mampu memberikan pelayanan optimal, rumah sakit harus mencari usaha untuk mampu membiayai diri sendiri agar dapat mengimbangi pengeluaran biaya operasional rumah sakit, oleh karena itu pihak manajemen rumah sakit perlu menggali semua potensi yang ada, untuk mengantisipasi perkembangan yang ada saat ini.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	2
C. Ruang lingkup pengawasan	2
BAB II : KONDISI BLUD	4
A. Gambaran Umum RSUD M.NATSIR	4
B. Pelayanan.....	8
C. Keuangan	10
D. Organisasi dan Sumber Daya Manusia	19
E. Sarana dan prasarana	27
BAB III :PELAKSANAAN PENGAWASAN.....	35
1. Kegiatan Pengawasan.....	35
2. Materi dan Hasil Pengawasan	
2.1. Rencana Strategis Bisnis BLUD (Renstra)	
2.1.1. Penilaian terhadap renstra	
2.1.2. Implementasi Renstra	
2.1.3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra	
2.1.4. Pendapat Dewan Pengawas dan Tindak lanjut yang perlu diambil oleh Pejabat Pengelola BLUD	
2.2. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD (RBA)	
2.1.1. Penilaian terhadap RBA	
2.1.2. Implementasi RBA	
2.1.3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RBA	

LAPORAN DEWAS BLUD RSUD M.NATSIR TAHUN 2021

2.1.5. Pendapat Dewan Pengawas dan Tindak lanjut yang perlu diambil oleh Pejabat Pengelola BLUD

3.	Evaluasi Kinerja.....	66
4.	Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku..	83
5.	Tindak lanjut atas hasil pengawasan sebelumnya.....	83
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		85

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Beris :

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan Pengawasan
- C. Ruang Lingkup Pengawasan

A. Latar Belakang

Rumah sakit merupakan salah satu bagian integral yang penting sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga perlu pengawasan secara khusus guna meningkatkan kinerja rumah sakit tersebut

Penyelenggaraan *Good Governance* merupakan syarat mutlak bagi setiap instansi rumah sakit untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara dalam meraih derajat kesehatan yang prima.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat berlangsung dengan berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no 109/PMK.05/2007 tentang dewan pengawas BLUD telah diatur ketentuan mengenai tugas dan kewajiban dewan pengawas untuk badan layanan umum termasuk rumah sakit.

Laporan dewan pengawas ini menguraikan sejauhmana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Bisnis Strategis, Rencana bisnis anggaran,serta kinerja pelayanan RSUD M.NATSIR SOLOK melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 baik yang bersumber dari APBD maupun dari sumber dana BLUD.

B. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud utama penyusunan Laporan Dewan Pengawas tahun 2021 merupakan informasi kinerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Laporan ini selanjutnya sebagai pertanggung jawaban hasil kinerja yang telah dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Laporan pengawas juga bertujuan untuk menjabarkan hasil capaian kinerja pelayanan kesehatan dari masing-masing unit yang berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok baik dari luar pelayanan extramural seperti pelayanan rujukan maupun pelaksanaan RSB, RBA dan pelayanan kesehatan lainnya

C. Ruang lingkup pengawasan

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan rumah sakit meliputi pedoman pembinaan dan pengawasan rumah sakit yang bersifat non teknis dan eksternal yang meliputi :

1. pelaksanaan hak dan kewajiban pasien
2. pelaksanaan hak dan kewajiban rumah sakit
3. penerapan etika rumah sakit (kode etik rumah sakit)
4. penerapan etika profesi (kode etik profesi dokter, perawat, kebidanan)
5. penerapan peraturan perundang undangan (bidang perumhaskitan)
6. penerimaan aduan dan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi

Laporan dewan pengawas ini meliputi :

1. Penilaian terhadap renstra bisnis, RBA dan pelaksanaannya
2. Penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan lainnya
3. Penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Permasalahan-permasalahan pengelolaan BLUD dan solusinya
5. Memberikan saran dan rekomendasi

BAB II

KONDISI BLUD

Bab II Berisi :

1. Sejarah RS Solok
2. Lokasi RS
3. Pelayanan RS
4. Keuangan
5. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
6. Sarana prasarana

2.1. Sejarah RSUD M.Natsir Solok

Pelayanan Kesehatan di Kota Solok pada zaman penjajahan berawal dari klinik pengobatan Korem 033 Wirayuda dan Rumah Sakit Pemerintah. Rumah Sakit Pemerintah tersebut merupakan cikal bakal Rumah Sakit Umum Daerah Solok yang berdiri sekitar tahun 40-an dan pada awalnya berlokasi di Jl. Sudirman Solok yang berdekatan dengan kompleks Pasar Raya Solok dengan jumlah tempat tidur sebanyak 40 tempat tidur. Pada saat tersebut Rumah Sakit banyak membantu masyarakat yang kena korban perang, disamping memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat Solok.

Sekitar Tahun 1979, Pelayanan yang diberikan meningkat dengan tersedianya dokter spesialis anak dan kebidanan. Dengan layanan Rawat Inap pada awalnya hanya terdiri dari bangsal umum dan kebidanan dengan ± 60 tempat tidur. Sedangkan layanan Rawat Jalan hanya dilayani oleh satu Poli Umum.

Pada tahun 1984 lokasi Rumah Sakit pindah ke Jl.Simpang Rumbio Solok, dan diresmikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada saat itu Ir.Azwar Anas pada tanggal 7 April 1984. Sedangkan layanan rawat inap telah berkembang dengan tambahan layanan rawat inap Anak, Penyakit Dalam dan Kebidanan. Pada saat tersebut pelayanan rawat inap juga dilakukan oleh Klinik Pengobatan Korem 033 Wirayuda berubah status menjadi Rumah Sakit Tentara (RST). Dengan pindahnya Rumah Sakit Umum ke jalan Simpang Rumbio yang lokasinya jauh dari pusat kota, menyebabkan pasien khususnya kasus kecelakaan lebih banyak dikirim ke RST.

Pada saat ini Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok kembali menjadi sumber rujukan utama untuk daerah sekitar. Hal ini utamanya disebabkan

oleh pengembangan dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya sarana dan prasarana serta SDM baik tenaga Spesialis, maupun tenaga kesehatan lainnya, sehingga tahun 1986 RSUD Solok diusulkan perubahan status menjadi Type C, dan ini dapat terwujud dengan ditetapkannya RSUD Solok sebagai Rumah Sakit Type C berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : 36 Tahun 1986 dan SK MenKes RI No : 303/Men.Kes/SK/IV/1987.

Pada tahun 2011 RSUD M.Natsir Solok berupaya menaikkan kelas RS menjadi kelas B dengan dikeluarkannya SK MenKes RI No: HK 03.05/520/2011 dan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : 440 – 343 / 2011, status RSUD M.Natsir Solok dinaikkan dari kelas C menjadi kelas B.

Upaya peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan secara terus menerus mampu meningkatkan status akreditasi rumah sakit. Misalnya, akreditasi pada bulan September 2003, untuk 5 kelompok pelayanan yaitu : pelayanan Gawat darurat, Rekam Medik, Admisnistrasi dan Manajemen, Pelayanan Medik dan Keperawatan dan pada tanggal 25 Oktober 2010 RSUD Solok telah diakui lagi dengan status penuh tingkat lanjut untuk 12 kelompok pelayanan yakni :

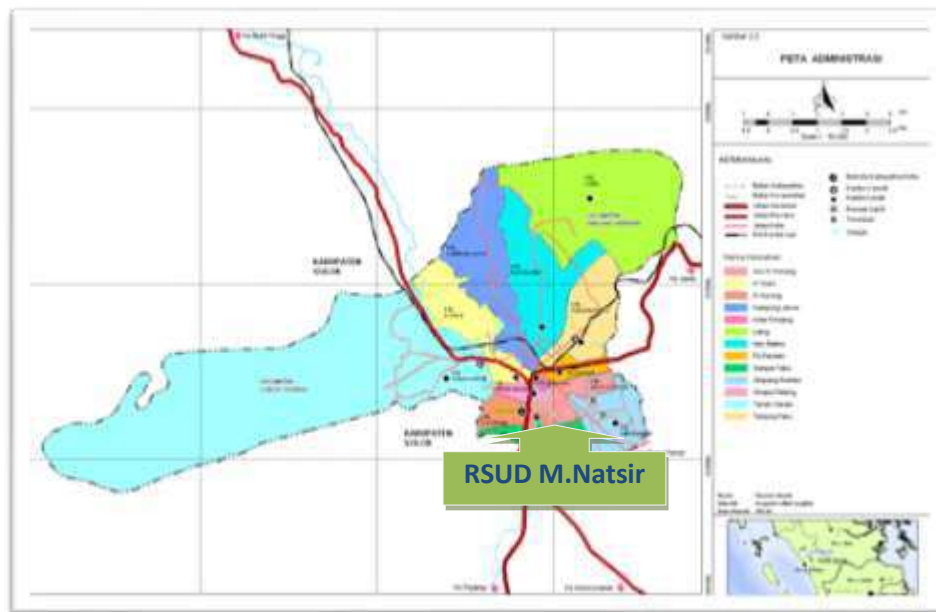
- Pelayanan Gawat darurat,
- Rekam Medik,
- Admisnistrasi dan Manajemen,
- Pelayanan Medik,
- Pelayanan Keperawatan,
- Pelayanan Farmasi,
- Pelayanan laboratorium,
- Pelayanan radiologi,
- Infeksi nosokomial,
- Pelayanan perinatologi,
- Pelayanan kamar operasi
- Kebakaran keselamatan kerja dan kewaspadaan bencana

Pada tahun 2013 RSUD M.Natsir Solok mengurus perubahan menjadi Badan Layan Umum Daerah dengan dikeluarkanya SK BLUD oleh Gubernur pada bulan Juli 2013, sehingga 2014 sudah efektif sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

2.2. Lokasi RSUD M.Natsir Solok

RSUD M.Natsir Solok adalah rumah sakit milik Provinsi Sumatera Barat yang terletak diwilayah administratif Kota Solok. Posisi RSUD M.Natsir Solok berada di kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.

Gambar 01
Peta Administratif Kota Solok



Posisi ini terletak diarea strategis dengan dikelilingi wilayah kota dan kabupaten sekitarnya. Sebelah utara, berbatasan dengan kabupaten solok dan tanah datar. Sebelah selatan dengan kabupaten solok dan solok selatan. Sebelah barat dengan kabupaten solok, kota sawah lunto, kabupaten sijunjung dan darmasraya.

Dengan letak yang strategis ini RSUD M.Natsir Solok banyak melayani pasien dari luar kota solok seperti kabupaten solok, kabupaten sijunjung, kabupaten darmasraya kota sawah lunto dan daerah lainnya. Persentase kunjungan berdasarkan asal daerahnya dapat kita lihat dari gambar dibawah.

Gambar 02

Persentase Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Asal Daerah Tahun 2021



RSUD M.Natsir Solok merupakan rumah sakit dengan bangunan yang memanjang dari depan ke belakang dengan akses jalan masuk dari jalan utama yang merupakan jalan dua jalur. Tepat didepan akses masuk utama langsung berhadapan dengan Instalasi Gawat Darurat. Disamping IGD berdiri Instalasi Rawat Jalan.

Gambar 03
Denah RSUD Mohammad Natsir



2.3. Pelayanan di RSUD M.Natsir Solok

Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok mempunyai beberapa jenis pelayanan kesehatan yang meliputi :

2.3.1. Pelayanan Poliklinik Rawat Jalan

- Poliklinik Bedah
- Poliklinik Penyakit Dalam
- Poliklinik Anak
- Poliklinik Kebidanan
- Poliklinik Kulit Kelamin
- Poliklinik Paru
- Poliklinik THT
- Poliklinik Mata
- Poliklinik Neurologi
- Poliklinik Bedah/ orthopedi
- Poliklinik Jiwa
- Poliklinik Jantung
- Poliklinik Gigi
- Poliklinik Geriatri

2.3.2. Pelayanan Rawat Inap

- Rawat Inap Bedah/Orthopedi
- Rawat Inap Penyakit Dalam
- Rawat Inap Anak
- Rawat Inap Kebidanan
- Rawat Inap Perinatologi
- Rawat Inap Paru
- Rawat Inap THT/Mata
- Rawat Inap VIP
- Rawat Inap Neurologi
- ICU

2.3.3. Pelayanan Penunjang

- Instalasi Radiologi
- Instalasi Laboratorium
- Instalasi Gizi
- Instalasi Rekam Medik
- Instalasi Fisioterapi
- Instalasi Perbaikan Sarana Rumah Sakit (IPSR)
- Instalasi Farmasi
- Pemulasaran Jenazah
- Laundry

2.4. KEUANGAN

Dengan dimulainya penerapan BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok, secara garis besar anggaran rumah sakit dibagi menjadi 2 bagian;

1. Anggaran APBD, dan
2. Anggaran BLUD

Pada prinsipnya kedua sumber dana tersebut sama-sama berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Dana yang berasal dari kas APBD dikelola sebagaimana biasanya sebelum BLUD, sedangkan dana yang bersumber

dari pendapatan BLUD bisa digunakan langsung oleh rumah sakit tanpa harus terlebih dahulu distor ke kas daerah, sehingga ini sangat membantu mengatasi keperluan pelayanan pasien yang sifatnya mendadak dan mendesak.

Tabel 1
Program dan Kegiatan APBD
tahun 2021

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
B	BELANJA	157.513.927.667
	APBD	15.436.477.177
I.I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	37.702.361.168
	Belanja Gaji dan Tunjangan	28.196.902.798
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	9.505.458.370
I.II	BELANJA LANGSUNG	14.191.924.529
II.I	PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS	14.191.924.529
	Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK)	10.330.487.529
	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	3.861.437.000
II.II	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	90.183.164.793
	Pelayanan BLUD RSUD	90.183.164.793

Tabel 2
Program dan Kegiatan BLUD
Tahun 2021

Nomor	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN 2021
1	2	3
I	ANGGARAN BLUD	89.100.000.000

	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	
	RSUD M.NATSIR SOLOK	
A	BELANJA PEGAWAI	77.160.000
	BELANJA PEGAWAI BLUD	77.160.000
	BELANJA PEGAWAI BLUD RSUD M.NATSIR	77.160.000
	Penatausahaan Keuangan	70.560.000
	-Belanja Pegawai	
	Peningkatan Pelayanan Siaga dan Tindak Siaga Medik	6.600.000
	-Belanja Pegawai	
B	BELANJA BARANG DAN JASA	83.203.358.000
	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	83.203.358.000
	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD RSUD SOLOK	83.203.358.000
1	PENATAUSAHAAN KEUANGAN	320.000.000
	-Honor PA/KPA/PPK/BEND	
	-Honor PPTK	
	-Honor Pengurus barang dkk	
	-Honor Pejabat Pengadaan	
	-Honor Pejabat Penerima	
2	PENINGKATAN PELAYANAN SIAGA DAN TINDAK SIAGA MEDIK	29.605.368.400
	-Belj.Jasa Pelayanan	
	-Honor Vakasi dokter	

	-Honor Komkordik Mahasiswa Kedokteran	
	-Honor Komkordik Mahasiswa Kep/Keb dan Tenaga Pejg lainnya	
	-Assosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI)	
	-Dewan Pengawas	
3	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	200.000.000
	-Belj.Alat tulis kantor	
4	PENYEDIAAN BAHAN KEBERSIHAN	300.000.000
	-Belj.Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	
5	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	445.740.200
	-Belanja Perlengkapan RT	
6	PENGADAAN MEBELEUR	73.675.000
	-Belanja Pengadaan Mebeleur	
7	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.270.000
	-Belanja Peralatan dan Perlengkapan kantor	
8	PENGADAAN PERALATAN MEDIS DAN PENUNJANG LAINNYA	101.925.000
	-Belanja Alat Kesehatan	
9	PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KEDOKTERAN	932.216.800
	-Belj.pemel.alat kedokteran	
10	PENYED.KOMP-INST-LISTRIK & PENERANGAN BANGUNAN KTR	50.210.000
	-Belj.Alat listrik	
11	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	662.700.000
	-Belj.makan kegiatan	

	-Belj.Jasa konsultasi kesehatan	
12	PENGADAAN GAS ELPIJI DAN GAS APAR	82.500.000
	-Belj.Pengadaan Gas Elpiji dan Gas APAR	
13	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	30.000.000
	-Honor Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja	
14	PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI	5.738.500
	-Pengad.Komp. dan Jaringan Komputerisasi	
15	PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPANNYA	274.400.000
	-Pengad.Pakaian Dinas	
16	PENGADAAN PERBENGGKELAN	80.727.400
	-Belanj-Perbengkelan	
17	PENYED.JASA PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR	26.820.000
	-Belj.Pencerama Agama	
18	PENGADAAN BAHAN LABORATORIUM	5.062.924.600
	-Belj.bahan laboratorium	
19	PENGADAAN OBAT-OBATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	11.638.155.500
	-Belj.Obat dan perbekalan kesehatan	
20	PENGADAAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI	10.072.490.500
	-Belanja Alat Kesehatan habis pakai	
21	PENGADAAN MAKAN DAN MINUM PASIEN DAN PETUGAS	1.675.000.000
	-Belj.Makan-minum pasien dan petugas	
22	PENGADAAN GAS OKSIGEN DAN N2O	1.000.000.000
	-Belj.Gas Oksigen dan N2O	

23	PELAYANAN DARAH	1.000.000.000
	-Belj.Kleam BDRS	
	-Belj.Kleam PMI BPJS /Umum/ Jamkesmas	
	-Belj.Kleam PMI RS Sijunjung	
	-Belj.Kleam PMI Jampersal	
	-Belj.Kleam PMI Pasien Covid	
24	PENYED.JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR,LISTRIK	2.000.000.000
	-Belj.Telepon/Internet	
	-Belj.Listrik	
	-Belj.Air	
25	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	3.000.000.000
	-Belj.Jasa Kebersihan (Cleaning Cervice)	
26	PENYED.BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	450.000.000
	-Belj.Cetak,peggandaan,penjilidan	
27	BANTUAN SEWA RUMAH DINAS	225.000.000
	-Belj.bantuan Perumahan	
28	PEMEL.RUTIN/BERKALA GDG RWT INAP/JALAN/INST.PENUNJANG	1.000.000.000
	-Belanja Pemeliharaan gedung RI/RJ/Inst.Penunjang	
29	PEMEL.IPAL,JARINGAN IPAL DAN PEMERIK-KUALITAS LINGKUNGAN	129.000.000
	-Belj.pemeliharaan IPAL	
	-Belj.pemeriksaan kualitas lingkungan	
30	PENINGKATAN PELAYANAN RUJUKAN PARSIAL	250.000.000
	-Belj.Rujukan Pasien Parsial BPJS	
31	PEMEL.RUTIN/BERKALA INSTALASI DAN	50.000.000

	JARINGAN	
	-Belj.Pemel.Instalasi dan Jaringan	
32	PEMEL.RUTIN/BERKALA GENSET	25.000.000
	-Belj.pemel.genset	
	-Belj.bahan bakar minyak	
33	PEMEL.RUTIN/BERKALA SUMUR BOR	35.000.000
	-Belj.pemel.Sumur Bor	
34	PEMEL.RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	213.100.000
	-Belj.Suku cadang / Service	
	-Belj.Pajak Kend./STNK	
35	PEMEL.RUTIN/BERKALA MOBILER	125.000.000
	-Belj.Pemel.Mobiler	
36	PEMEL.RUTIN/BERKALA KOMPUTER DAN JARINGAN	250.000.000
	-Belj.Pemel.Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan	
37	PEMEL.RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RS	100.000.000
	-Belj.peralatan dan perlengkapan RS	
38	PENGELOLAAN LIMBAH B3	800.000.000
	-Belj.Pengelolaan Limbah B3 RS	
39	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.000.000
	-Belj.Perangko/Materai	
	-Belj.Jasa Pengiriman/Paket	
40	PENYEDIAAN ASURANSI KENDARAAN	80.000.000
	-Belj.Asuransi kendaraan dinas/operasional	
41	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN	15.000.000

	PERUNDANG2-AN	
	-Belj.Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an	
42	RAPAT-RAPAT KOORD-DAN KONSULTASI LUAR DAN DALAM DAERAH	400.000.000
	-Belj.Bahan Bakar Minyak	
	-Belj.Perj.dinas dalam daerah	
	-Belj.Perj.dinas luar daerah	
43	PENINGKATAN PELAYANAN RUJUKAN PASIEN UMUM/BPJS	150.000.000
	-Belj.Bahan Bakar Minyak	
	-Belj.Perj.dinas dlm daerah perawat Pendamping	
	-Belj.Jasa Pengantaran Sampel PCR ke Unand	
44	PENYED.JASA KEAMANAN,SOPIR,CUSTOMER DAN PENUNJANG	2.500.000.000
	-Belj.J.Keamanan,sopir,customer dan penunjang	
45	PENYEDIAAN TENAGA BLUD	6.879.248.000
	-Gaji Tenaga BLUD	
46	PENYED.JASA TENAGA PENDUKUNG ADM TEKNIS PERKANTORAN	34.450.000
	-Gaji Pegawai PTT	
47	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	85.000.000
	-Belj.Survey Kepuasan Masyarakat	
48	PENINGKATAN MOTIVASI KINERJA PEGAWAI	65.500.000
	-Belj.Motivasi Kinerja Pegawai	
49	PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA	482.238.100
	-Belanj-Perj.Dinas Dalam Daerah	
	-Belanj-Perj.Dinas Luar Daerah	

50	PROMOSI KESEHATAN	37.960.000
	-Belanja Promosi Kesehatan	
51	PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM	85.000.000
	-Belj.Makan dan minum rapat	
52	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	50.000.000
	-Belj.Pakaian Kerja Lapangan	
53	SOSIALISASI PKRS	25.000.000
	-Belanja Sosialisasi PKRS	
	BELANJA MODAL	5.819.482.000
	BELANJA MODAL BLUD	5.819.482.000
	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN	3.919.482.000
54	BM-PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	449.267.800
	-BM-Perlengkapan RT	
55	BM-PENGADAAN MEBELEUR	839.120.000
	-BM-Pengadaan Mebeleur	
56	BM-PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	408.008.600
	-BM-Pengad.Peralatan dan Perlengkapan Ktr	
57	BM-PENGADAAN ALAT KES-MEDIS DAN PENUNJANG LAINNYA	1.796.385.000
	-BM-Pengadaan Alat Kes Medis dan Penujang lainnya	
58	BM-PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI	383.500.600
	-BM-Pengadaan Komp.dan Jaringan Komputerisasi	

59	BM-PENGADAAN PERBENGGKELAN	8.700.000
	-BM-Perbengkelan	
60	BM-PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR	34.500.000
	-BM-Pengadaan Kendaraan Bermotor	
	BELANJA MODAL PENGADAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	1.900.000.000
61	BM-PEMBANGUNAN GUDANG RUMAH SAKIT	400.000.000
	-BM Konstruksi Fisik	
	-BM Perencanaan	
	-BM Pengawasan	
	BM-PEMBANGUNAN RAM OK CENTRAL	1.230.000.000
62	-BM Pembangunan RAM OK Central	
	-BM Perencanaan	
	-BM Pengawasan	
63	BM- PENINGKATAN BASEMENT GEDUNG PUSAKO	270.000.000
	-BM Konstruksi Fisik	
	-BM Perencanaan	
	-BM Pengawasan	
	Jumlah	89.100.000.000

2.5. Organisasi dan Sumber Daya Manusia RSUD M.Natsir Solok

2.5.1. Organisasi RSUD M.Natsir Solok

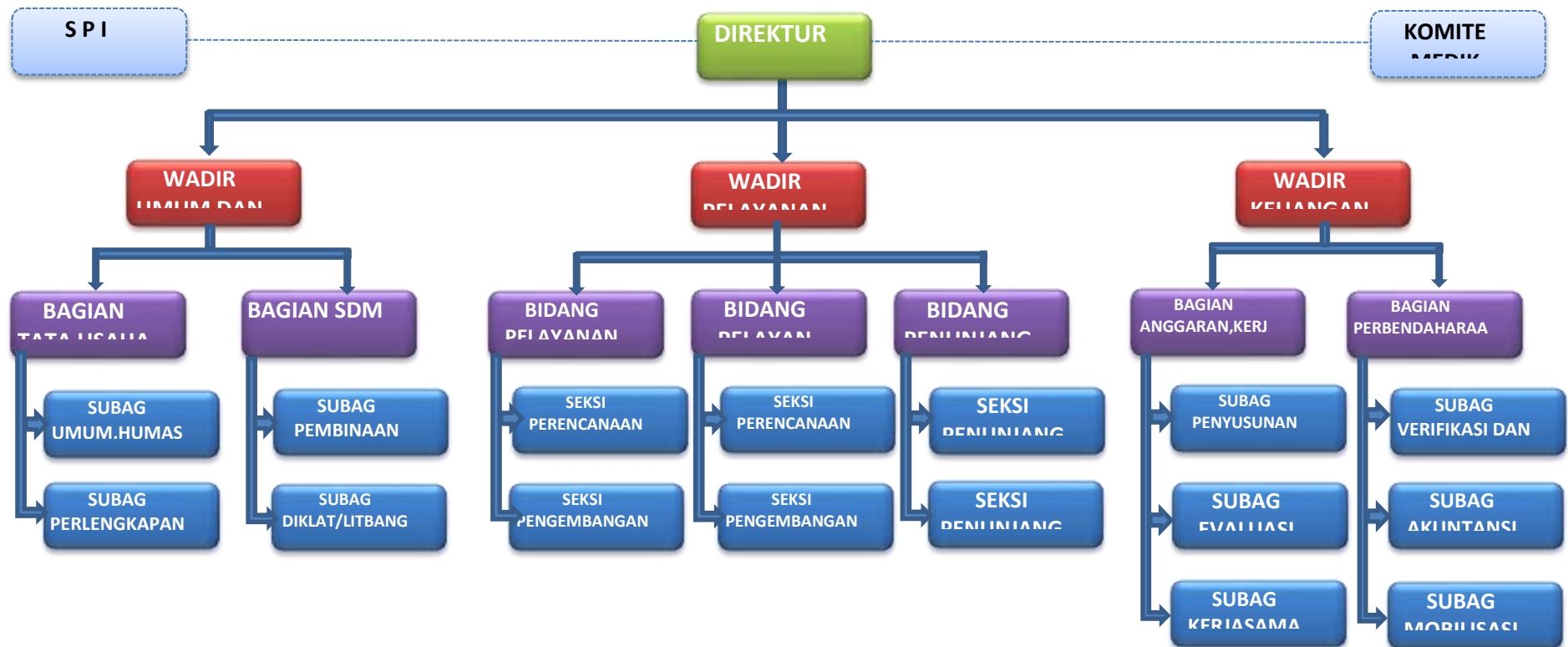
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Solok serta Pergub Nomor 33 tahun 2013 tentang pola tata kelola RSUD Solok dapat gambaran yang lebih rinci tentang uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, ruang lingkup tugas pejabat RS, sehingga kemungkinan duplikasi/tumpang tindih tugas, kekaburan wewenang/tanggung jawab serta kesalahan prosedur dapat diminimalkan.

Susunan Organisasi dan Tata Laksana Struktural RSUD Solok berdasarkan Perda Nomor 06 tahun 2012 dan Pergub Nomor 33 tahun 2013 tentang pola tata kelola RSUD Solok terdiri dari:

1. Direktur
2. Wakil Direktur Pelayanan;
 - a. Bidang Pelayanan Medis
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Medis
 - 2) Seksi Pengembangan Mutu
 - b. Bidang Pelayanan Keperawatan
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan
 - 2) Seksi Pengembangan Mutu
 - c. Bidang Penunjang
 - 1) Seksi Penunjang Medis
 - 2) Seksi Penunjang Non Medis
3. Wakil Direktur Umum dan SDM;
 - a. Bagian Tata Usaha
 - 1) Sub Bagian Umum, Humas dan Promkes
 - 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
 - b. Bagian SDM
 - 1) Sub Bagian Pembinaan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Diklat/Litbang dan Sertifikasi

4. Wakil Direktur Keuangan;
 - b. Bagian Anggaran, Kerjasama dan Investasi
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Kerjasama dan Investasi
 - c. Bagian Perbendaharaan
 - 1) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan
 - 2) Sub Bagian Akuntansi dan Aset
 - 3) Sub Bagian Mobilisasi Dana
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Komite-Komite;
7. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Gambar 05
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD SOLOK
(PERDA NO 6 TAHUN 2012)



.5.2. Tugas Pokok Dan Fungsi RSUD M.Natsir Solok

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No.06 tahun 2012 dan Pergub Nomor 33 tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Pola Tata Kelola RSUD Solok dinyatakan bahwa Tugas Pokok Rumah Sakit Umum Daerah Solok yaitu “ *Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan* “.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas Rumah Sakit Umum Daerah Solok mempunyai fungsi-fungsi Pelayanan Publik sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Medis
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
- c. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
- d. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan
- e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
- g. Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan

Fungsi – fungsi tersebut diatas dilaksanakan oleh seorang Direktur sebagai Koordinator dan Staf Fungsional atau Struktural secara bersama-sama.

2.5.3 Sumber Daya Manusia

Tabel 3

Data Tenaga Medis RSUD Mohammad Natsir Tahun 2021

No	Jenis Tenaga	Stand ar tenaga	Tenag a PNS	Tugas Belajar	Kontra k/ referral	Kebutu han
I.	Spesialis Dasar					
1	Dr.Spesialis Kebidanan	3	1	-	2	2
2	Dr.Spesialis Anak	3	2	-	-	1

3	Dr.Spesialis P.Dalam	3	4	1	-	-
4	Dr.Spesialis Bedah	3	4		-	-
II	Spesialis Penunjang					
1	Dr.Spesialis Anastesi	2	2	1	-	-
2	Dr.Spesialis Radiologi	2	1	1	-	-
3	Dr.Spesialis RM	2	1	-	-	1
4	Dr.Spesialis P.Klinik	2	1	2	-	-
5	Dr.Spesialis Patologi Anatomi	2	1	1	-	-
III	Spesialis lain					
1	Dr.Spesialis THT	1	1	1	-	-
2	Dr.Spesialis Orthopedi	1	-	1	2	1
3	Dr.Spesialis Jiwa	1	1	1	-	-
4	Dr.Spesialis Neurologi	1	3	-	-	-
5	Dr.Spesialis Mata	1	2	1	-	-
6	Dr.Spesialis Kul/kel	1	-	1	1	1
7	Dr.Spesialis Jantung	1	1	1	-	-
8	Dr.Spesialis Paru	1	1	1	-	-
9	Dr.Spesialis Urologi	1	-	-	-	1
10	Dr.Spesialis Bedah Syaraf	1	-	-	-	1
11	Dr.Spesialis Gigi Mulut	1	-	-	1	1
12	Dr. Spesialis Rehab Medik	1	1	-	-	-
IV	Dr.Spesialis Orthodonsi					
1	Dr.Spesialis Prostodonsi	1	-	-	-	1
2	Dr.Spesialis Konservasi	1	-	-	-	1

3	Dr.Spesialis Bedah Mulut	1	-	1	1	-
V Dr.Sub.Spesialis						
1	Dr.Sub.Spesialis Bedah	1		-	-	1
2	Dr.Sub.Spesialis P.Dalam	1	1	-		-
3	Dr.Sub.Spesialis Anak	1	1	-	-	-
4	Dr.Sub.Spesialis Kebidanan	1	1	-	-	-
5	Dr.Sub.Spesialis Mata	1	-	-	-	1
6	Dr.Sub.Spesialis THT	1	-	-	-	1
7	Dr.Sub.Spesialis Kulit/Kelamin	1	-	-	-	1
8	Dr.Sub.Spesialis Syaraf	1	-	-	-	1
9	Dr.Sub.Spesialis Jiwa	1	-	-	-	1
10	Dr.Sub.Spesialis Orthopedi	1	-	-	-	1
11	Dr.Sub.Spesialis Jantung	1	-	-	-	1
12	Dr.Sub.Spesialis Paru	1	-	-	-	1
VI Dokter Umum						
1	Dokter Umum Dasar	12	21	16	8	-
2	Dokter Gigi Umum	3	2	1	-	-
Jumlah		61	51	31	14	21

Selain dari tenaga medis, juga ada tenaga kesehatan yang bukan dari medis dan keperawatan;

Tabel 4
Data Tenaga Kesehatan Non Medis
Dan Non Keperawatan
Tahun 2021

No	Nama jabatan	Standar tenaga	Tenaga pns
1	Struktural	27	27
2	SKM	Disesuaikan	2
3	Apoteker	12	9
4	D IV/ S1 Gizi	Disesuaikan	2
5	D III Gizi	Disesuaikan	8
6	D III Rekam Medis	Disesuaikan	13
7	DIV Radiologi	Disesuaikan	2
8	D III Radiologi	Disesuaikan	6
9	D III Anastesi	Disesuaikan	1
10	S1 Fisioterapi	Disesuaikan	2
11	D III Fisioterapi	Disesuaikan	4
12	D III Refraksi	Disesuaikan	1
13	D III Farmasi	Disesuaikan	11
14	Atem D IV	Disesuaikan	1
15	Atem D III	Disesuaikan	3
16	D III Perawat Gigi	Disesuaikan	2
17	SPRG	Disesuaikan	2
18	SAA/SMF	Disesuaikan	1
19	SMAK	Disesuaikan	2
20	Analisis Kesehatan D III	Disesuaikan	7
21	Fungsional Adminkes S1/S2	Disesuaikan	3
22	Fungsional Arsiparis S1	Disesuaikan	1
23	Fungsional Umum S1	Disesuaikan	11
24	Fungsional Umum D III	Disesuaikan	2
25	Fungsional Umum SMA	Disesuaikan	25
26	Fungsional Umum SMP	Disesuaikan	4
27	Fungsional Umum SD	Disesuaikan	1
28	Pranata Komputer	Disesuaikan	1
		Jumlah	154

Tenaga keperawatan adalah SDM terbanyak di RSUD Mohammad Natsir , lebih dari separo tenaga rumah sakit terdiri dari tenaga keperawatan;

**Tabel 5
Data Tenaga Keperawatan Tahun 2021**

No	Nama Jabatan	Standar Tenaga	Tenaga PNS
1	Perawat S2	Permenkes 56 th 2014	3
2	Perawat S1	sebanyak jumlah tempat tidur	55
3	Perawat D III	Sda	82
4	Perawat SPK	Sda	4
5	Bidan D IV	Sda	2
6	Bidan D III	Sda	16
7	Bidan D I	Sda	1
.		Jumlah	163

2.6 Sarana dan Prasarana

Sesuai dengan isu strategic dan sasaran jangka menengah RSUD M.Natsir Solok, sarana dan prasarana merupakan hal yang menjadi penentu utama tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan paripurna, sehingga dari tahun ketahun rumah sakit selalu berupaya untuk menambah sarana dan prasarana rumah sakit baik dengan pengadaan dengan dana APBD maupun dengan dana BLUD. Ketercapaian sarana prasarana juga menjadi Indikator Kinerja Utama RSUD M.Natsir Solok tahun 2016-2021. Sebagai gambaran sarana dan prasarana yang dimiliki RSUD Solok tahun 2021 dapat dilihat dari table dibawah;

2.6.1 Tempat Tidur

Tabel 06
Jumlah Tempat Tidur Tahun 2021

No	Ruangan	VVIP	VIP	Isolasi	HCU	RR	Combustio	NI CU	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Jumlah
1	Pusako	1	3	0	0	0	0	0	10	0	0	14
2	Interne	0	0	0	4	0	0	0	12	12	18	46
3	Bedah	0	0	2	0	6	2	0	5	8	12	35
4	ICU	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
5	Kebidanan	0	0	0	0	0	0	0	4	6	16	26
6	Paru	0	0	0	1	0	0	0	4	3	9	17
7	Neurologi	0	0	0	4	0	0	0	10	6	10	30
8	THT/ Mata	0	0	0	0	0	0	0	4	3	4	11
9	Perinato Logi	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0	15
10	Anak	0	2	3	5	0	0	0	4	8	14	36
11	Jantung	0	0	0	0	0	0	0	4	5	11	20
12	Jiwa	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	12
13	Serunai	1	7	0	0	0	0	0	22	0	0	30
TOTAL		2	12	5	27	6	2	2	81	58	102	297

Tempat Tidur adalah sarana utama rumah sakit pada pelayanan rawat inap. Jumlah tempat tidur di rumah sakit dijadikan sebagai dasar penghitungan kinerja rumah sakit dalam indikator kinerja BOR (Bed Occupying Rate).

2.6.2 Gedung

Luas gedung dan bangunan RSUD Mohammad Natsir 2,88 Ha dengan luas lahan 3,06 Ha. Sebagian besar gedung dan bangunan serta tataruangnya telah direnovasi secara bertahap guna memenuhi tuntutan perkembangan pelayanan.

Gambar 06

Gedung Pusako RSUD Mohammad Natsir



- Gedung Poliklinik II
- Gedung Instalasi Gawat Darurat bertingkat
- Gedung Laboratorium
- Gedung Administrasi
- Gedung Instalasi Radiologi
- Gedung Rekam Medik
- Gedung IPSRS
- Gedung Kamar Operasi bertingkat
- Gedung Unit Fungsional Kebidanan dan Gynekologi
- Gedung Unit Fungsional Kesehatan Anak I, II
- Gedung Unit Fungsional Penyakit Bedah
- Gedung Unit Fungsional Penyakit Dalam
- Gedung Unit Fungsional Mayang Tarurai/Interne Wanita
- Gedung Prefentif Medical Center PMC/ VIP

- Gedung Unit Fungsional ICU
- Gedung Instalasi Gizi
- Gedung Instalasi Farmasi
- Gedung Instalasi Rehabilitasi Medik
- Gedung Inerator
- Gedung Instalasi Forensik dan Medico Legal
- Gedung Generator
- Gedung IDT
- Gedung VIP
- Gedung PERISTI

2.6.3 Sarana Prasarana Lainnya

- Tempat Jemuran kain
- Bak pengelola air limbah
- Gedung Mushalla
- Selasar
- Tempat Bermain Anak

Gambar 07
Tempat Bermain Anak



- Areal parkir
- Jalan Lingkar
- WC.Umum
- Sarana Kebersihan dan pengendalian lingkungan.
 - Sampah Medis

- Sampah Non Medis
 - o Pengelolaan Sampah.
 - o Pengelolaan Limbah.
- Limbah Padat Pemakaian Incenerator
- Limbah Cair.Pemakaian IPAL
- Sarana Air Bersih
 - Air PDAM
 - Sumur Bor (2 bh)
 - Water Treat Print (WTP)
- Penerangan (Listrik)
 - Perusahaan Listrik Negara (PLN)
 - Genset (2 Unit)
 - Perpustakaan
- Terminal Pasien Pulang

Gambar 08
Terminal Pasien Pulang



2.6.4 Alat Kesehatan

Sehubungan dengan adanya dokter spesialis jantung, dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis patologi klinik dan spesialis patologi anatomi, maka rumah sakit mengadakan peningkatan pelayanan melalui pengadaan alat kesehatan guna menunjang pelayanan pada spesialisik tersebut ;

FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery)

FESS adalah alat bedah sinus yang dilakukan dengan menggunakan endoskopi dengan tujuan untuk melakukan eradikasi penyakit, memperbaiki aliran udara dan drainase sinus dengan prinsip mempertahankan fungsi sinus itu sendiri. Operasi ini di masukan dalam kategori operasi minimal invasif yaitu seminimal mungkin untuk merusak jaringan yang sehat, dan semaksimal mungkin mempertahankan fungsi dari organ yang sakit.

Gambar 09

FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery)



- **Endoskopi**

Endoscopy adalah alat untuk tindakan non bedah yang digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan dari pasien dan, dalam beberapa kasus, disertai pengobatan, jika sudah memungkinkan. Tindakan ini menggunakan endoskop, tabung lentur (fleksibel) dengan kamera yang melekat pada salah satu ujungnya. Kamera tersebut mengambil gambar bagian dalam dari saluran pencernaan, memungkinkan dokter yang memeriksa untuk melihat gambar tersebut melalui layar televisi yang terhubung dengan endoskop.

- **Fluoroscopy**

Fluoroscopy adalah alat untuk tindakan pencitraan medis yang digunakan oleh dokter untuk mengambil gambar dari organ tubuh tertentu dan untuk melihat video pergerakan berbagai bagian tubuh di layar fluoresen secara langsung. Tindakan ini menggunakan teknologi sinar-X dan bahan pewarna pembanding, yang membuat bagian tubuh menjadi tidak tembus pandang dan terlihat dengan lebih jelas. Fluoroskopi umumnya digunakan untuk mendiagnosis penyakit dan juga sebagai tindakan intervensi dalam bidang ortopedi, gastroenterologi, dan kardiovaskuler.

Sehubungan dengan selesainya dokter spesialis jantung melakukan pendidikan sub spesialis jantung, maka di tahun 2019 RSUD Mohammad Natsir sudah melayani tindakan Cateter jantung/ catlab.

2.6.5 Kendaraan Dinas

Pada Tahun 2021 RSUD Mohammad Natsir mempunyai 11 unit mobil dinas dan ambulan yang masih beroperasi, yaitu;

Tabel 06
Kendaraan Dinas Operasional RSUD Mohammad Natsir
Tahun 2021

NO	JENIS KENDARAAN	NOMOR POLISI	TAHUN PEMBUATAN	KET
1	Ambulance Toyota Kijang	BA 8724 P	1999	Baik
2	Ambulance Toyota Kijang	BA 9095 AK	2003	Baik
3	Ambulance Kijang Kapsul	BA 9118 AK	2003	Baik
4	Ambulance Toyota Kijang	BA 9042 AK	2006	Baik
5	Ambulance KIA Prego	BA 8037 PE	2008	Baik
6	Operasional Kijang Inova	BA 26 PA	2011	Baik
7	Ambulance FORD EVEREST	BA 1851 B	2013	Baik
8	ISUZU Panther	BA 1649 P	2014	Baik
9	Ambulance 118 Toyota Hiace	BA 7239 B	2015	Baik
10	ISUZU Panther	BA 1309 B	2016	Baik
11	Ambulance ISUZU 2,5	B 1609 SIX	2018	Baik

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN

3.1. Kegiatan Pengawasan

Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 446 -622-2020 tanggal 11 November 2020 dengan masa bakti 2020 – 2024.

Tugas dewan pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan badan layanan umum daerah yang dilakukan oleh pejabat pengelola badan layanan umum RSUD M.Natsir Solok yang meliputi :

Bab III Beris :

1. *Kegiatan Pengawasan*
2. *Materi dan hasil pengawasan*
3. *Evaluasi Kinerja*
4. *Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku*
5. *Tindak lanjut atas hasil pengawasan sebelumnya*

- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah
- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah meliputi:
 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD
 3. Kinerja BLUD

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 446 -622-2020 tanggal 11 November 2020 dengan masa bakti 2020 – 2024 ditetapkan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Solok sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

Masa bakti tahun 2020 – 2024

NO	NAMA	Kedudukan dalam Dewan Pengawas
1	Drs. Hansastri, Akt.MM.CFrA	Ketua
2	Zaenuddin,SE,MM	Anggota
3	Evino Sugriarta,SKM,MKes	Anggota

Dewan pengawas dibantu oleh seorang sekretaris yang berasal dari RSUD M.Natsir Solok yaitu Aprizal Malik,SE,MM, MSi

Dalam menjalankan tugasnya selama masa pandemi covid 19 tahun 2021 ini, Dewan Pengawas melaksanakan pertemuan/ rapat melalui zoom meeting pada tanggal 31 maret 2021. dan hanya melaksanakan rapat resmi tatap muka sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di bulan Juli, Oktober dan bulan Desember tahun 2021.

Pada pertemuan Zoom meeting tanggal 31 Maret 2021 tersebut karena pandemi covid 19 sedang berjangkit dan meluas serta adanya kebijakan pemerintah dalam pembatasan tatap muka. Disamping itu direktur juga melakukan beberapa konsultasi via telepon perihal kesiapan rumah sakit dalam pencegahan dan penanganan wabah covid 19. Begitu juga dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian diluar pertemuan tatap muka dilakukan melalui

pertemuan serta konsultasi non formal ketika direksi / direktur dinas ke Padang dan bertemu dengan ketua atau anggota dewan pengawas.

3. 2. Materi dan Hasil Pengawasan

Terdapat 1 kali rapat pertemuan Dewan Pengawas dengan pihak direksi melalui zoom meeting serta 3 (tiga) kali pertemuan resmi tatap muka antara direksi dengan dewan pengawas dalam tahun 2021 ini yaitu

- a. Tanggal 31 Maret 2021 dilakukan rapat zoom meeting dengan jumlah peserta rapat sebanyak 3 orang dari dewan pengawas dan direksi sebanyak 4 orang. Dalam rapat tersebut materi rapat adalah evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan dan pengendalian covid 19. Arahan dari Ketua Dewan pengawas bahwa sebagai rumah sakit rujukan Covid, RSUD M. Natsir harus selalu siap untuk melayani pasien yang datang baik yang bersifat suspek maupun yang positif. Untuk itu prioritas anggaran harus dilakukan untuk penyediaan sarana peralatan dan perlengkapan dalam penanganan covid tsb. Direktur dalam penjelasannya menyampaikan bahwa RSUD M. Natsir selalu siap dalam layanan covid dan sudah menyiapkan satu gedung Serunai khusus untuk merawat pasien yang suspek dan positif covid. Wadir Keuangan juga menyampaikan harapan agar proses pemberian insentif bagi petugas dapat ditampung melalui dana APBD Prov Sumbar, mengingat sebelumnya pada tahun 2020. dana insentif petugas pelayanan covid 19 dibayarkan melalui dana kementerian kesehatan. Wadir Pelayanan juga menyampaikan bahwa jumlah tenaga medis yang sudah terpapar covid 19 cukup banyak sehingga perlu protokol kesehatan yang ketat dan pemeriksaan yang berkala supaya pelayanan tetap bisa diberikan.

- b. Tanggal 30 Juni 2021 bertempat di Padang (resto suaso) pada jam 17.00 dalam rapat Dewan pengawas tersebut, dihadiri oleh seluruh dewan Pengawas dan sekretaris dewan pengawas serta pihak direksi ditambah dengan komite mutu rumah sakit.

Dalam pertemuan yang dibuka oleh Ketua Dewan Pengawas Drs.Hansastri,Akt,MM,CRfA ini memulai dengan arahan tentang pentingnya peran dan kesiapan rumah sakit dalam pencegahan dan penanganan pandemi covid 19. Beliau juga menjelaskan tentang kondisi keuangan Pemprov Sumbar yang minim dalam penanganan covid 19 ini, sehingga beliau meminta semua OPD termasuk rumah sakit agar bisa melakukan berbagai upaya efisiensi serta mengajukan proposal bantuan covid 19 kepada Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya sesi Pemaparan Direktur menjelaskan tentang kondisi terkini terkaid dengan upaya rumah sakit dalam pencegahan dan penanganan covid 19 antara lain :

- Sejak tanggal 18 maret RSUD M.Natsir Solok telah menyiapkan ruangan isolasi pagi penderita covid 19 dengan jumlah tempat tidur sebanyak 2 unit. Ruangan isolasi ini sebagai upaya awal sebelum pasien covid 19 ini dirujuk ke RSUP M.Jamil Padang sebagai sentra rujukan covid 19 Sumatera Barat
- Pada Bulan Mei 2021 RSUD M.Natsir telah menambah jumlah kamar isolasi serta tempat tidur sebanyak 16 unit. Hal ini dilakukan karena semakin terjadi peningkatan kasus covid di Sumatera Barat. Dan akibat kesulitan dari RSUP M.Jamil Padang dalam menerima dan menampung pasien covid dari seluruh Kabupaten / Kota di Sumatera Barat
- Jumlah ODP (orang dalam pemantauan) yang sudah datang ke RSUD M. Natsir Solok sampai periode Mei 2021 sebanyak 95 orang

- Jumlah PDP (Pasien dalam pengawasan) berjumlah sebanyak 50 orang
- Sampai akhir Mei 2021 ini semua pasien yang dirawat di RSUD M.Natsir Solok kondisinya negative covid 19
- Dengan semakin meningkatnya kasus positif kasus di Propinsi Sumatera Barat dan sesuai dengan kebijakan dari Gubernur Sumatera Barat tentang kesiapan RS dalam penanganan kasus covid, maka RSUD M.Natsir merencanakan penambahan jumlah ruangan isolasi dari 4 ruangan menjadi 13 ruangan serta penambahan tempat tidur dari 8 tempat tidur menjadi 26 tempat tidur.
- Dampak dari pandemic covid 19 ini menyebabkan kondisi keuangan RSUD M.Natsir mengalami penurunan drastis, dimana dalam kondisi normal pendapatan rumah sakit rata –rata 7 – 8 milyar perbulan, dan pada bulan April hanya 2,5 milyar dan terus mengalami penurunan di bulan Mei hanya sebesar 1,7 milyar.
- Penurunan pendapatan ini sangat berimbas dan berdampak besar terhadap kemampuan rumah sakit dalam mengelola belanjanya terutama belanja tetap seperti Gaji pegawai BLUD, karyawan outsourcing tenaga satpam, cleaning service dan sopir. Begitu juga terhadap belanja tidak tetap seperti biaya listrik, air, telepon serta belanja operasional lainnya.
- Kondisi kesulitan keuangan RSUD M.Natsir ini sudah disampaikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat namun masih belum ada solusinya. Menurut Bakeuda , sumber dana Pemerintah Provinsi Sumbar juga terbatas kecuali dana yang berkaitan langsung dengan penanganan covid 19.
- Jumlah kekurangan dana untuk belanja operasional RSUD M. Natsir saat ini perbulan adalah sebesar 4 (empat) milyar

Menanggapi pemaparan direktur RSUD M.Natsir Solok, Dewan pengawas memberikan tanggapan dan masukan sebagai berikut :

Dari Ketua Dewan Pengawas (Drs. Hansastri,Akt,MM,CFrA) memberikan tanggapan antara lain :

- Belanja langsung APBD Provinsi Sumatera Barat yang tersedia 3 triliun terdiri dari BOS pendidikan 1 triliun termasuk juga dana BLUD
- Pemerintah pusat mengurangi alokasi dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah
- Akibat pandemic covid 19 ini juga memberikan pengaruh penurunan terhadap keuangan daerah Pemprov Sumbar.
- Refocusing dilakukan mencapai 570 milyar sehingga masing – masing OPD sudah tidak ada lagi anggaran untuk kegiatan kecuali hanya untuk anggaran operasional rutin saja
- Saat ini sangat sulit bagi APBD tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sumbar untuk menanggung belanja modal / investasi saat ini
- Untuk mengatasi permasalahan rumah sakit terkait kesulitan operasional maka terbuka bagi direksi untuk membuat kebijakan berupa opsi merumahkan karyawan BLUD serta melakukan upaya efisiensi lainnya untuk mengandalikan semakin membengkaknya biaya operasional.
- Terbuka juga opsi yang mesti dilakukan oleh direksi untuk mengkaji kembali komposisi prosentase jasa pelayanan

Dari Anggota Dewan Pengawas (Zaenuddin SE,MM) memberikan tanggapan dan arahan antara lain :

- Saat ini di tengah masa pandemic semua rumah sakit mengalami kesulitan keuangan termasuk RSUD M Natsir. Untuk menyikapi hal tsb pihak direksi harus segera melakukan inovasi layanan.
- Bapak Zaenuddin memberikan contoh bahwa saat ini RSUP M.Jamil Padang kebanyakan sumber pendapatannya berasal dari layanan covid 19. Ini bisa menjadi salah satu opsi juga bagi RSUD M.Natsir untuk mengantisipasi turunnya jumlah kunjungan pasien ke rumah

sakit. Dengan memaksimalkan layanan covid 19, maka rumah sakit bisa mengklaim sumber pembiayaan melalui kementerian kesehatan.

Selanjutnya rapat dewan pengawas ini memberikan kesempatan kepada komite mutu rumah sakit (Ns Arlina S.Kep,Mkes) untuk memaparkan beberapa perkembangan mutu layanan RSUD M.Natsir Solok antara lain :

- Terjadi penurunan kunjungan pasien sejak bulan maret 2021 yang diakibatkan wabah virus covid 19, baik kunjungan rawat jalan maupun kunjungan rawat inap
- Daerah asal pasien yang paling banyak datang ke RSUD M.Natsir berasal dari masyarakat Kota Solok
- Indikator pelayanan berupa BOR mengalami penurunan . angka BOR bulan mei sebesar 49 % dan kemungkinan ini mengalami trend yang cenderung menurun pada bulan berikutnya
- Masih kurangnya kepatuhan staf medis / DPJP di RSUD M.Natsir terhadap clinical pathway
- Masih banyaknya tempat tidur di RSUD M.Natsir yang belum memenuhi standar dari segi safetynya
- Kepatuhan cuci tangan bagi petugas dan pengunjung rumah sakit masih kurang terkait dengan minimnya sarana cuci tangan
- Kepatuhan jam visite dokter spesialis masih diangka 68 % disebabkan terbatasnya jumlah dokter
- Angka kematian pasien di IGD dalam 24 jam masih tinggi
- Masih lamanya waktu tunggu layanan pasien rawat jalan
- Kematian persalinan di RSUD M.Natsir cukup rendah.
- Keterlambatan perbaikan dan pemeliharaan alat yang digunakan masih cukup lama

Pemaparan komite mutu ini diperkuat oleh tambahan informasi dari Wadir Pelayanan (Dr.Elfi Fitraneti,Sp.PD) antara lain :

- Saat ini di RSUD M.Natsir hal yang perlu untuk ditingkatkan adalah program pemeliharaan alat untuk menjaga alat dari kerusakan dan mencegah biaya perbaikan maupun pembelian yang cukup besar
- Peralatan yang canggih seperti CT Scan, fluoroscopy, endoscopy, mammografi, dll perlu pemeliharaan rutin berkala meskipun tidak digunakan untuk layanan pasien sedangkan anggaran yang tersedia sangat terbatas
- Masalah limbah rumah sakit saat ini masih belum sesuai ketentuan regulasi pengelolaan lingkungan
- Kapasitas IPAL saat ini masih terbatas, dan perlu dilakukan peningkatan agar tidak menimbulkan masalah lingkungan bagi rumah sakit maupun lingkungan masyarakat sekitar.
- Kualitas air bersih rumah sakit perlu menjadi perhatian karena masih ditemui zat yang tidak higienis
- Dengan banyaknya OTG (orang tanpa gejala) covid 19, agar diusulkan semua petugas dokter/tenaga kesehatan di RSUD M Natsir untuk

dilakukan rapid test, terutama dokter yang akan melakukan tindakan langsung (dokter gigi, mata , tht dan lainnya)

Dari pemaparan komite mutu ini, dewan pengawas memberikan tanggapan dan arahan sebagai berikut :

- Drs Hansastri Akt,MM,CFrA
Terkait dengan laporan PMKP / mutu layanan rumah sakit yang akan ditandatangani oleh , sebaiknya terlebih dahulu direksi dan tim komite mutu melaksanakan pemaparan dan pembahasan bersama dengan dewan pengawas sebelum penandatanganan dokumen, sehingga ada perbaikan dan masukan terhadap laporan tersebut

- Evino Sugriarta,SKM,Mkes

Dalam penyelenggaraan mutu layanan di RSUD M.Natsir , agar pelaporan oleh komite mutu bersama dengan direksi dilakukan secara berkala sehingga pemantauan dan pengendalian pelaksanaan mutu layanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat dapat di evaluasi secara optimal

Terhadap tanggapan dan masukan dari dewan pengawas tersebut, direktur bahwa indicator mutu sudah ada ketentuannya dari KARS dan masing- masing ruangan memilih indicator tersebut kemudian baru minta persetujuan dewan pengawas untuk menjadi indicator rumah sakit yang akan dilaksanakan. Komite mutu juga berjanji bahwa akan menyampaikan laporan mutu secara berkala setiap 3 (tiga) bulan
Selanjutnya Rapat dilanjutkan dengan penyerahan dokumen laporan mutu secara formal kepada dewan pengawas, yang diserahkan oleh direktur dan diterima oleh ketua dewan pengawas.

Tema rapat /diskusi berikutnya membahas tentang penanganan layanan covid 19 di RSUD M.Natsir Solok yang saat ini masih belum memiliki tariff untuk pemeriksaan rapid tes maupun swab test bagi pasien umum. Terhadap persoalan tersebut Drs.hansastri Akt,MM,CFrA menyarakan kepada direktur untuk segera membuat draft peraturan Gubernur tentang tariff Rapid dan swab test tersebut mengacu kepada tarif rumah sakit maupun klinik sekitar. Usulan Pergub tarif tersebut diajukan melalui Kepala Bakeuda Zaenuddin,SE,MM.

Dalam lanjutan pemaparan Wadir pelayanan dr.Elfi Fitraneti,Sp.Pd yaitu terkait tentang beberapa hal antara lain :

- bahwa BOR rumah sakit sampai bulan mei 2021 sebesar 49 %, dimana pada bulan maret masih di angka 65 %
- total PDP 57 orang dan ODP 90 orang
- Jumlah dokter obgyn masih kurang 2 orang, dimana kondisi saat ini hanya ada 2 orang sedangkan kebutuhannya 4 orang
- Peralatan cathlab belum tersedia, padahal dokter jantung telah 2 tahun ini selesai menyelesaikan pendidikan
- Training dan pelatihan SDM masih kurang
- APD masker khusus bedah sangat mahal dan jumlahnya terbatas

Terkait dengan keluhan wakil direktur tentang APD masker khusus bedah yang jumlahnya sangat terbatas dan juga mahal, Drs Hansastri Akt,MM,CFrA juga menanggapi bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah banyak menyediakan dana untu APD tersebut, kenapa tidak sampai ke RSUD M.Natsir Solok. Tanggapan juga disampaikan oleh Zaenuddin SE,MM bahwa terkait dengan APD ada 9 rumah sakit yang ditujuk dan pemberiannya dikoodinir oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Sehingga pihak RSUD M.Natsir agar segera menyampaikan dan

melaporkan kondisi kelangkaan dan kemahalan APD tersebut ke Dinkes. Disamping itu beliau juga menjelaskan bahwa RS terdiri dari level 1 sampai level 3 prioritas dalam penyaluran dan pemberian bantuan APD tersebut.

Selanjutnya rapat dilanjutkan dengan tema keuangan yang disampaikan oleh wadir keuangan Yopi Oktavia,SE,Akt. Dimana dengan kondisi keuangan yang cukup berat dalam masa pandemi ini rumah sakit melakukan berbagai upaya efisiensi terutama pada biaya operasional. Untuk belanja modal / investasi di tunda terlebih dahulu serta juga melakukan berbagai upaya penyederhanaan pegawai BLUD dan karyawan BLUD

Tanggapan semua dewan pengawas memberikan dukungan dan support terhadap upaya yang dilakukan oleh direksi dalam menghadapi situasi sulit saat ini .

Selanjutnya rapat ditutup oleh ketua dewan pengawas.

- c. Pertemuan / rapat Dewan pengawas dengan Direksi pada tanggal 17 Desember 2021 bertempat di ruangan kerja Ketua Dewan Pengawas di Kantor Gubernur Prov Sumbar di Padang

Dalam pertemuan ini Rapat dibuka oleh Drs Hansastri yang mengawali tentang bagaimana kondisi pelaksanaan pelayanan rumah sakit serta pelaksanaan kegiatan sampai akhir tahun 2021.

Selanjutnya pemaparan disampaikan oleh Direktur yang menjelaskan bahwa Saat ini rumah sakit sudah dilakukan kajian feasibility studi tentang pengembangan rumah sakit dengan pola KPBU yang dibantu konsultannya oleh Bappenas RI. Tahapan akhir dari hasil tersebut sudah memasuki tahapan market sounding Pemprov Sumbar dengan investor yang difasilitasi oleh Bappenas di Jakarta. Selanjutnya bahan hasil kajian tersebut sedang dibahas dan dikaji oleh DPRD Prov Sumbar untuk meminta persetujuan pola KPBU ini.

Disamping itu, dengan kondisi pandemi ini kunjungan rawat jalan dan kunjungan rawat inap mengalami penurunan yang cukup drastis. Disamping itu kebijakan rujukan online juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap turunnya kunjungan pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir

Untuk target Pendapatan mengalami penurunan akibat menurunnya jumlah kunjungan. Begitu juga dengan belanja. Khususnya belanja yang bersumber BLUD juga mengalami penurunan seiring dengan penurunan pendapatan BLUD. Untuk Belanja APBD. RSUD M. Natsir

telah melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan target baik secara realisasi fisik maupun realisasi keuangan.

Untuk pendapatan yang bersumber dari covid. Masih dalam tahapan verifikasi oleh Kementerian kesehatan.

Selanjutnya pertemuan dilanjutkan dengan diskusi tentang terkait dengan laporan akhir tahun serta penyampaian sisa dana UYHD kepada kas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelum tanggal 31 Desember 2021.

3.2.1. Rencana Strategis Bisnis BLU (Renstra)

a. Penilaian terhadap Renstra

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat.

1. Pernyataan Visi dan Misi

Mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dibidang Kesehatan yang tertuang pada misi 3, yaitu Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi,

RSUD M.Natsir Solok telah menetapkan VISI dalam renstra revisi sebagai berikut :

1) "VISI :

"Rumah Sakit Terbaik Di Provinsi Sumatera Barat"

Terbaik yang dimaksud disini adalah suatu kondisi dimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik serta berkualitas, baik dari sisi prosedur, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta berwawasan lingkungan.

2) MISI :

Untuk mencapai Visi tersebut di atas maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Paripurna
2. Meningkatkan Kemandirian dan Tata Kelola Rumah Sakit Pendidikan

3) TUJUAN:

- * Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas

* Terwujudnya Peningkatan Kemandirian dan Tata Kelola RS

3) SASARAN :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
- b. Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit
- c. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Rumah Sakit

1) Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

MISI I: Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Paripurna

Tujuan 1 : Terwujudnya Pelayanan yang berkualitas

Tabel 07

Indikator Kinerja Tujuan 1

No	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR TUJUAN
1	Persentase angka kematian NDR GDR	< 2,5 % <4,5 %

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi RSUD

Mohammad Natsir

Rumah Sakit umum Mohammad Natsir mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Sedangkan fungsi RSUD Mohammad Natsir adalah :

- 1) Penyelenggaraan Pelayanan Medis
- 2) Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang medik dan Non Medik
- 3) Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan.
- 4) Penyelenggaraan pelayanan rujukan
- 5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- 6) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
- 7) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Dalam masa pandemi Covid 19 pada tahun 2021 ada beberapa masalah pokok yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir antara lain :

- 1) Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia Rumah Sakit terdiri dari tenaga medis, perawat, tenaga kesehatan lainnya, serta tenaga administrasi.
Dilihat dari sisi tenaga medis, masih terdapat kekurangan jumlah tenaga medis saat ini terutama untuk spesialis Obsgyn, Anak, kulit/kelamin, PA, serta tenaga sub spesialis. Begitu juga dari sisi perawat, jumlah perawat yang ada saat ini masih belum sesuai dengan standar ketenagaan. Akibat dari kekurangan tenaga ini menyebabkan pelayanan yang diberikan masih belum optimal.
- 2) Masih kurangnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia masih belum dapat dilaksanakan sesuai dengan standar, dimana standar diklat adalah semua petugas minimal satu kali/ orang / pertahun. Namun karena keterbatasan anggaran hanya 52,9 % rata – rata pertahun yang dapat dilaksanakan.
- 3) Masih belum terpenuhinya Prasarana dan Sarana Rumah Sakit
Peningkatan kelas Rumah Sakit perlu disikapi dengan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit, dimana sarana dan prasarana yang

ada saat ini belum lagi memenuhi kebutuhan dan tuntutan dari pelayanan.

4) Standarisasi Rumah Sakit

Pelayanan Rumah Sakit yang bermutu adalah pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelayanan yang bermutu adalah harapan dari pasien dalam memperoleh pelayanan, untuk itu standarisasi Rumah sakit merupakan isu yang strategis yang perlu dikembangkan melalui akreditasi Rumah Sakit.

Berikut dapat dilihat Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Tabel 08
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar Yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Tingkat Capaian Kinerja RS	-Beberapa target kinerja belum tercapai, terutama untuk respond time pasien di IGD, Pelayanan Ponek Terstandar, dan Tingkat kemandirian keuangan Rumah Sakit yang masih rendah	SPM	- Keterbatasan Anggaran dalam merekrut tenaga melalui Dana BLUD - Keterbatasan Anggaran dalam Pengadaan Sarana Rumah Sakit, Terutama untuk peningkatan dan pmbangunan Gedung	- Masih kurangnya pengangkatan tenaga PNS untuk RS -Keterbatasan anggaran untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana RS	- Rumah Sakit Belum Terakreditasi Versi 2012 Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana RS -Belum Optimalnya Kompetensi Petugas -Masih Kurangnya Jumlah Tenaga RS - Tingkat kemandirian Rumah Sakit Masih

					rendah, sehingga belum mampu membiayai untuk investasi
--	--	--	--	--	--

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah

Visi Kepala daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

“ Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera “

Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit terdapat pada Misi 3, yaitu:

Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi

Berikut dapat dilihat telaahan visi, misi dan program pemerintah daerah

Tabel 09
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Mohammad Natsir Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
1	Misi 3 :	1. Masih kurangnya SDM	1. Pengangkatan untuk tenaga kesehatan masih terbatas, terutama untuk tenaga spesialis dan sub spesialis, serta tenaga keperawatan.	1. Sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional

Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi	2. Kualitas SDM msh bekum optimal	2. Diklat untuk petugas terbatas masih	2. Kerjasama dengan BPJS
	3 Masih kurangnya sarana dan prasarana rumah sakit	3. Sarana dan prasarana masih belum memenuhi standar	3. Rumah Sakit Pendidikan
			4. Dukungan Ketersediaan anggaran dari APBD dan APBN
	5) Mutu pelayanan masih rendah, karena belum standarisasi sesuai dengan Standar Akreditasi versi 2012		5. PPK-BLUD
Program			
1.Program standarisasi RS			
1. Pengadaan Sarana dan prasaran rumah Sakit			
2. Program Pelayanan BLUD			

3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra RSUD Mohammad Natsir

a. Renstra Kementerian Kesehatan

Program prioritas pembangunan dibidang kesehatan sesuai Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014 – 2019, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 10
Permasalahan Pelayanan RSUD Mohammad Natsir berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan RSUD Mohammad Natsir	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
1	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	1. Masih kurangnya SDM	1. Pengangkatan untuk tenaga kesehatan masih terbatas, terutama untuk tenaga spesialis dan sub spesialis, serta tenaga keperawatan.	1. Sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional
2	Meningkatnya Pengendalian Penyakit	2. Kompetensi petugas belm memenuhi standar	2. Diklat untuk petugas terbatas	2. Kerjasama dengan BPJS
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3. Masih kurangnya sarana dan prasarana rumah sakit	3. Sarana dan prasarana masih belum memenuhi stansar	3. Rumah Sakit Pendidikan
		4. Mutu pelayanan belum optimal	Rumah sakit belum akreditasi versi 2012	4. Dukungan Ketersediaan anggaran dari APBD dan APBN

Telaahan dilihat dari Renstra RSUD Mohammad Natsir dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 11
Permasalahan Pelayanan RSUD Mohammad Natsir berdasarkan
Sasaran beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra RSUD Mohammad Natsir	Permasalahan Pelayanan RSUD Mohammad Natsir	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
1	Meningkatnya Mutu pelayanan RS	1.Masih kurangnya SDM	1.Pengangkatan untuk tenaga kesehatan masih terbatas, terutama untuk tenaga spesialis dan sub spesialis, serta tenaga keperawatan.	1.Sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional
2	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas SDM	2.Kompetensi petugas belm memenuhi standar	2.Diklat untuk petugas masih terbatas	2.Kerjasama dengan BPJS
3	Meningkatnya Sarana dan Prasaran RS	3.Masih kurangnya sarana dan prasarana rumah sakit	3. Sarana dan prasarana masih belum memenuhi stansar	1`1`
		4.Mutu pelayanan belum optimal	4. Rumah sakit belum akreditasi versi 2012	4.Dukungan Ketersediaan anggaran dari APBD dan APBN

4. Penentuan isu – isu strategis

Isu – isu strategis dalam pengembangan pelayanan RSUD Mohammad Natsir adalah sebagai berikut:

1. Jaminan Pembiayaan Masyarakat

Isu strategis ini dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan RSUD Mohammad Natsir , yaitu dengan adanya jaminan pembiayaan bagi masyarakat baik dalam bentuk asuransi yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah berupa jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin, sehingga anggaran untuk pelayanan sudah tersedia.

2. Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas Sumberdaya Manusia perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pelayanan Rumah Sakit, karena manusia yang berkualitas akan dapat melaksanakan pelayanan yang bermutu yang dapat memanfaatkan perkembangan IPTEK.

3. Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Pengadaan peralatan dan pembangunan gedung, baik pelayanan rawat inap, rawat jalan maupun penunjang/instalasi akan dapat meningkatkan pelayanan. Untuk itu pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit merupakan isu strategis yang penting dalam pengembangan Rumah Sakit.

Penentuan Isu Strategis Rumah sakit berdasarkan telaahan isu srategis sebgia berikut :

4.4. Strategi dan Kebijakan RSUD Mohammad Natsir

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan Visi dan Misi SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12
Strategi dan Kebijakan RSUD Mohammad Natsir

VISI : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani			
MISI 3 : Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarkter dan berkualitas tinggi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Terwujudnya pelayanan yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	1.Strategi 1.1 Melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasien/masyarakat 2. Strategi 1.2 Meningkatkan Mutu Pelayanan melalui standarisai Rumah Sakit	1. Arah Kebijakan 1.1 Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Arah Kebijakan 1.2 Melaksanakan Akreditasi Rumah Sakit 1.3 Meningkatkan Sarana dan Prasarana RS

Tujuan 2 Terwujudnya Peningkatan Kemandirian dan Tata Kelola RS	1. Sasaran 2.1 Meningkatnya Tata Kelola RS	1. Strategi 2.1 Meningkatkan kinerja manajemen Rumah Sakit	1. Arah Kebijakan 2.1 Meningkatkan Kompetensi SDM
	2. Sasaran 2.2 Meningkatnya Kemandirian Keuangan RS	2. Strategi 2.2 Meningkatkan Pendapatan Rumah Sakit 2. Strategi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan RS	2. Arah Kebijakan 2.2 Meningkatkan jenis layanan

b. Implementasi Renstra

Dalam menerapkan Renstra, Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok Tahun 2021 melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra

Dalam melaksanakan implementasi renstra oleh pejabat BLUD masih ditemui beberapa kendala antara lain :

1. Dalam pelaksanaan renstra RSUD Solok tahun 2016 – 2021 mengalami revisi yang disebabkan adanya penyempurnaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi terhadap capaian sasaran

2. Kendala yang menyangkut sarana dan prasarana, terutama yang berkaitan dengan sarana peralatan dan gedung dalam menunjang pelayanan dalam upaya mencapai target MDG's tahun 2020, masih belum terpenuhi.
3. Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan inti yang terdiri dari dokter dan paramedis merupakan tantangan dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas.
4. Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk percepatan kemandirian pelayanan, hal ini mengakibatkan masih ditemuinya sarana dan prasarana pelayanan yang masih belum sesuai standar rumah sakit umum kelas B
5. Adanya kompetisi usaha perumahan sakitan yang ada disekitar kabupaten / kota terdekat dalam pelayanan rujukan merupakan tantangan bagi Rumah Sakit untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan
6. Kemampuan penerapan IPTEK yang rendah mengakibatkan mutu pelayanan yang dihasilkan relatif kurang. Hal ini merupakan tantangan bagi Rumah Sakit dalam mengembangkan pelayanan.

d. Pendapat Dewan Pengawas dan Tindak Lanjut yang perlu diambil oleh Pejabat pengelola BLUD

Berdasarkan kendala – kendala yang dihadapi oleh RSUD Solok dalam melaksanakan implementasi renstra, dewan pengawas telah memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar dalam perencanaan dan implementasi renstra melibatkan secara aktif seluruh unsur unsur terkait baik yang bersifat internal maupun piha- pihak eksternal
2. Agar dilakukan revisi capaian kinerja sasaran yang berorientasi pada hasil bukan pada output saja

3. Untuk mengatasi kekurangan sarana peralatan medis maka dewan pengawas menyarankan agar pejabat pengelola BLUD untuk dapat melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan beberapa distributor alat dengan prinsip saling menguntungkan terlebih lagi tidak merugikan pelayanan pasien
4. Perlu dilakukan pengaturan jumlah petugas SDM secara lebih efektif dan efisien berdasarkan lebutuhan dan kunjungan pasien ke rumah sakit
5. Dimasa Pandemi Covid 19, Untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan terutama yang terpapar covid 19 maka dewan pengawas menyarankan agar pejabat pengelola BLUD agar melakuka seleksi untuk pengangkatan tenaga relawan non PNS secara selektif dan memperhatikan ketersediaan anggaran operasional
6. Agar Pejabat BLUD dapat memaksimalkan penggunaan teknologi terutama SIMRS yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat

3.2.2.Rencana Bisnis Anggaran BLU (RBA)

3.2.2.1.Penilaian terhadap Rencana Bisnis Anggaran

1. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2021
Untuk memproyeksikan data keuangan 1 tahun kedepan baik penerimaan maupun belanja digunakan asumsi eksternal dan internal

1.1.1. Asumsi Makro

No	Indikator Ekonomi	Asumsi TA 2021
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,2%

2	Tingkat Inflasi (%)	7,7 %
3	Pertumbuhan pasar (%)	9,5%
4	Tingkat suku bunga pinjaman (%)	9%
5	Kurs (Rp)	14.500

3.2.2. Asumsi Mikro

1. Kebijakan Akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Masih mendapat subsidi Pemerintah
3. Pasien Gakin masih ditanggung Pemerintah
4. Penyesuaian tarif Rumah Sakit sesuai unit *costnormative*
5. Penyesuaian tarif Askes sesuai dengan tarif RumahSakit
6. Peningkatan pendapat

3.2.2.2 Implementasi Rencana Bisnis dan anggaran

Program Kerja dan Kegiatan pada RBA

1. Program Kerja :

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Solok

2. Kegiatan Pelayanan, terdiri dari :

- 1 Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan
- 2 Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai
- 3 Pengadaan Bahan Laboratorium
- 4 Pengadaan Makan dan Minum Pasien & Petugas
- 5 Pengadaan Gas Oksigen dan N₂O
- 6 Pelayanan Darah
- 7 Peningkatan Pelayanan Siaga dan Tindak Siaga Medik
- 8 Pengadaan Jasa Surat Menyurat
- 9 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 10 Penyediaan Jasa kebersihan kantor
- 11 Penyediaan alat tulis kantor
- 12 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- 13 Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 14 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
- 15 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 16 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga
- 17 Penyediaan Bahan kebersihan
- 18 Penyediaan Makanan dan Minuman
- 19 Penyediaan Jasa Pembinaan mental dan Fisik Apratur
- 20 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 21 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- 22 Bantuan sewa rumah dinas

- 23 Peningkatan pelayanan Kesehatan Rujukan
- 24 Peningkatan Pelayanan Rujukan/Rujukan Parsial/Pemulangan Pasien Umum/BPJS
- 25 Pemeliharaan Rutin berkala Rumah Dinas
- 26 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 27 Pemeliharaan rutin/berkala mobile
- 28 Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi dan jaringan
- 29 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan
- 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan RS
- 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rawat Inap,Rawat Jalan dan Instalasi Penunjang
- 32 Penyediaan jasa keamanan,sopir,customer service dan jasa penunjang lainnya
- 33 Pemeliharaan dan kalibrasi alat kedokteran
- 34 Pemeliharaan IPAL,Jaringan IPAL dan pemeriksaan kualitas lingkungan
- 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset
- 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Incenerator
- 37 Pembuatan Taman RS
- 38 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
- 39 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan
- 40 Pengadaan Peralatan Perbengkelan RS
- 41 Penatausahaan Keuangan
- 42 Promosi Kesehatan
- 43 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan/Sharing Informasi
- 44 Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai
- 45 Penyediaan Tenaga BLUD RS
- 46 Pelatihan PPGD

- 47 Pelatihan Ponek
- 48 Pelatihan Keuangan
- 49 Pelatihan Endoskopi
- 50 In House PPI
- 51 Pelatihan BHD
- 52 Pelatihan Pasien Safety
- 53 Pelatihan Evakuasi Bencana
- 54 Pelatihan Penanggulangan Bencana kebakaran
- 55 Magang Keperawatan/Bidan/Penunjang
- 56 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi
Teknis/Perkantoran
- 57 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sumur Bor
- 58 Pengadaan gedung dan sarana pustaka
- 59 Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Penunjang Lainnya
- 60 Peningkatan gedung CSSD
- 61 Pengelola Kepegawaian
- 62 Pengadaan Peralatan Pengelolaan Limbah
- 63 Penyediaan Jasa Sisitim Informasi Managemen RS
- 64 Peningkatan Ged.Peristi
- 65 Pengadaan Rumah Dinas
- 66 peningkatan Gedung Laundry
- 67 Akreditasi Rumah Sakit
- 68 Pengadaan Generator
- 69 Pembuatan Sumur bor
- 70 Pembuatan sarana penyewaan kuliner/food court
- 71 Peningkatan sarana ged. Rawat Inap Interne
- 72 Peningkatan Ruang Kearsipan
- 73 Penyediaan Arus Listrik
- 74 Pembuatan Landasan counter Sampah
- 75 Peningkatan Sarana Pagar

e. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran

Dalam melaksanakan implementasi RBA oleh pejabat BLUD masih ditemui beberapa kendala antara lain :

1. Dalam pelaksanaan RBA RSUD Solok tahun 2021 Bidang Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan mencapai Rp. 63.936.404.986. Sedangkan target dari TAPD Pemprov Sumbar berjumlah sebesar Rp. 89.1 milyar. Realisasi ini tidak tercapai karena menurunnya kunjungan pasien serta belum diterimanya piutang layanan covid 19 dari Kementerian Kesehatan RI
2. Untuk Belanja operasional BLUD masih ditemui kesulitan pemenuhan permintaan belanja obat dan bahan habis pakai serta belanja operasional lainnya yang disebabkan tidak lancarnya aliran cash dana BLUD, apalagi dimasa Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah kunjungan pasien dan berimbas terhadap pembiayaan operasional rumah sakit.
3. Dalam penyusunan laporan keuangan BLUD, belum dapat dilaksanakan karena terbatasnya jumlah tenaga keuangan dan keterampilan akuntansi.

Dalam pelaksanaan RBA, Dewan Pengawas berpendapat bahwa Pejabat pengelola BLUD perlu melakukan beberapa kebijakan dan tindakan sebagai berikut :

1. Untuk proses penyusunan RBA agar pejabat pengelola melakukan mekanisme pembahasan pada semua unit layanan yang ada untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan baik yang bersifat mendesak maupun kebutuhan yang bersifat reluger/rutin

2. Untuk menjaga keseimbangan pendapatan dan belanja, Direksi agar melakukan kendali biaya terutama pada biaya-biaya operasional yang masih bisa di efisienkan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan
3. Untuk Meningkatkan pembiayaan rumah sakit, pihak direksi dapat melakukan inivasi layanan terutama untuk pelayanan covid 19 dengan melibatkan seluruh nakes yang ada ikut bersama-sama mengembalikan pemulihan aliran kas pembiayaan rumah sakit
4. Agar proporsi anggaran BLUD lebih memperhatikan belanja modal yang proporsional sehingga juga dapat meningkatkan proporsi belanja pada tingkat Propinsi Sumatera Barat .
5. Untuk Percepatan pelaksanaan belanja BLUD terutama pengadaan barang / jasa maka dimasa pandemic covid sebaiknya pejabat pengelola segera menyusun peraturan pimpinan BLUD sebagai penjabaran teknis Peraturan Gubernur tentang jenjang nilai pengadaan pada RS BLUD
6. Agar pengelola keuangan BLUD menyiapkan sistim pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan SIMRS
7. Untuk penyusunan laporan keuangan BLUD agar pejabat pengelola dapat bekerjasama dengan konsultan / atau lembaga pemerintah seperti BPKP dalam pembimbingan / assistensi penyusunan laporan.

3. 4. EVALUASI KINERJA

Monitoring dan Evaluasi terhadap Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran dilakukan secara periodik setiap tiga bulan. Laporan dikumpulkan secara berkala kepada bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan SPO yang ada, kemudian Rapat Evaluasinya dilakukan secara bersama dalam rapat Evaluasi Capaian Kinerja yang dipimpin langsung oleh Direktur. Evaluasi menilai sejauh mana Rencana Aksi dilaksanakan dan capaian sudah memenuhi target atau belum, dan langkah apa yang dilakukan kedepanya.

Tabel

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Sasaran

Indikator Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis 1/ Indikator Kinerja 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
			TW 1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM	75%	77%	79%	83%	75%	77%	79%	99,71%
No	Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan				Program/Kegiatan				
		I	II	III	IV					
1	Menetapkan Jadwal Survey					Peningkatan Pelayanan BLUD / Survey IKM				
2	Mengkomunikasikan kegiatan survey dengan surveyor					Peningkatan Pelayanan BLUD / Survey IKM				
3	Melaksanakan Survey					Peningkatan Pelayanan BLUD / Survey IKM				
4	Menerima hasil survey					Peningkatan Pelayanan BLUD / Survey IKM				
5	Mensosialisasikan hasil survey					Peningkatan Pelayanan BLUD / Survey IKM				
6	Menindaklanjuti hasil survey					Peningkatan Pelayanan BLUD / Survey IKM				
7	Menyusun laporan evaluasi capaian kinerja					Peningkatan Pelayanan BLUD / Survey IKM				

Sasaran Strategis 2/ Indikator Kinerja 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW1	TW2	TW3	TW4
2	Meningkatnya Tata Kelola RS	Nilai Evaluasi Sakip				A (81)				BB (73)
No	Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan				Program/Kegiatan				
		I	II	III	IV					
1	Pengumpulan data capaian kinerja					Program Pelayanan BLUD				
2	Perumusan capaian realisasi target					Program Pelayanan BLUD				
3	Tindak lanjut dari hasil evaluasi					Program Pelayanan BLUD				
4	Penyusunan Laporan evaluasi capaian kinerja					Program Pelayanan BLUD				

Sasaran Strategis 3/ Indikator Kinerja 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
3	Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit	Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)	70%	70%	70%	75%	40%	40%	40%	43%
No	Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan				Program/Kegiatan				
		I	II	III	IV					
1	Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan RS					Program Pelayanan BLUD				
2	Perbaikan Pelayanan sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar pelayanan sehingga kunjungan RS meningkat					Program Pelayanan BLUD				
3	Peningkatan sarana pelayanan sesuai standar pelayanan					Program Pelayanan BLUD				
4	meningkatkan inovasi dalam pelayanan RS					Program Pelayanan BLUD				
5	Evaluasi capaian Target Kinerja					Program Pelayanan BLUD				

Analisis Capaian Kinerja RSUD Mohammad Natsir

Evaluasi dan analisis terhadap hasil pengukuran Kinerja per-sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit, mutu pelayanan rumah sakit mempunyai indikator yang berbeda dengan peningkatan mutu kesehatan secara makro. Rumah sakit adalah pemberi pelayanan publik yang bersifat *supporting* terhadap pencapaian peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara umum. Paradigma berpikir pada level yang lebih tinggi seperti dinas kesehatan dan gubernur sebagai pemilik indikator kinerja peningkatan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Barat akan sedikit berbeda.

Berikut akan dipaparkan pencapaian indikator kinerja RSUD Mohammad Natsir / RSUD Mohammad Natsir yang mengacu pada sasaran diatas;

Tabel
Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2020	TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83%	97.71%	120	120
		2. Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna (80)	Paripurna (80)	100	100

Indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas merupakan Indikator Kinerja Utama RSUD Mohammad Natsir yang sangat menentukan dalam mutu layanan di RSUD Mohammad Natsir, dari capaian-capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Mohammad Natsir diatas dapat dijelaskan sbb:

a. Kepuasan Pasien/ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai IKM RSUD Mohammad Natsir Tahun 2021 merupakan hasil Survey dari Lembaga Independen yaitu Universitas Andalas. Survey dilakukan dari tanggal 23 Agustus s/d 23 September 2021. Secara umum survey dilakukan pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Penunjang.

Tabel
Capaian Indikator Kinerja 1

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2020	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1 Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM	89,5%	83%	99,71%	120

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja IKM Rumah Sakit Tahun 2020 adalah 99,7% dengan persentase capaian

120%. Jika dibandingkan dengan target Tahun ini (2021) yaitu 83%, capaian ini sudah **sangat baik**.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun lalu yaitu 89,5%, capaian tahun ini juga lebih baik.

Analisa dari pencapaian target kinerja ini adalah karena adanya usaha yang maksimal dari rumah sakit dalam upaya peningkatan derajat kepuasan pasien/IKM dengan mengadakan berbagai Program dan Kegiatan, baik kegiatan berupa pembangunan fasilitas pelayanan maupun peningkatan SDM dari segi kualitas maupun kuantitas.

Kegiatan yang dilakukan rumah sakit dalam upaya peningkatan kepuasan pasien antara lain adalah :

1. Upaya Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Upaya kesehatan lingkungan berperan penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan dan kepuasan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, disebutkan bahwa penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit adalah kegiatan pencegahan penurunan kualitas media lingkungan.

Disebutkan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit, salah satunya dilaksanakan melalui pengamanan terhadap limbah rumah sakit. "Penyelenggaraan pengamanan limbah di rumah sakit meliputi pengamanan terhadap limbah padat domestik, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah cair, dan limbah gas," pungkasnya.

Terdapat perlakuan khusus dalam penyelenggaraan pengamanan limbah rumah sakit, terutama limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara lain dalam aturan pewadahan tong sampah,

yaitu: 1) tong sampah non medis : plastic hitam, 2) tong sampah medis : plastic kuning.

2. Case Manager

Ibarat pembeli, pasien sebagai klien adalah raja. Karena itu kepuasan mereka terhadap pelayanan rumah sakit adalah sesuatu harus diwujudkan.

Untuk memastikan pelayanan diberikan sesuai standar, berdasarkan sistem operasional dan prosedur (SOP), serta berlandaskan pada prinsip hospital by law dan mutu layanan, diperlukan adanya unit yang menjadi penghubung antara pasien dengan profesional pemberi asuhan (PPA).

"Dalam rangka itulah dibentuk sebuah unit yang disebut Case Manager, atau CM," Case Manager pada hakekatnya adalah pendamping pasien, supaya hak-hak mereka atas pelayanan rumah sakit terpenuhi. "Untuk rumah sakit, keuntungannya adalah terdeteksinya secara lebih dini masalah-masalah serta kendala-kendala yang terjadi, sehingga bisa segera diselesaikan segera," ungkap Anggra Pramana.

Lebih lanjut keuntungan keberadaan CM antara lain adalah; biaya pelayanan efektif, pelayanan holistik, adanya kontinuitas pelayanan, serta kejelasan bagi pasien untuk berkomunikasi dengan para pihak.

"Muaranya adalah peningkatan mutu pelayanan dan peningkatan kepuasan pasien,"

Secara organisasi Case Manager berada dan bertanggungjawab pada direktur rumah sakit. sedangkan dasar pembentukan CM, imbuh Radimas, adalah amanat dari Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS). "Tetapi, CM tidak sama dengan penyidik. CM diperlukan di sebuah rumah sakit untuk komunikasi internal. Jika ada kasus, maka tugas CM lah untuk merunutnya. Caranya dengan mendengarkan keluhan pasien atas pelayanan, kemudian dikomunikasikan dengan PPA, dari situ baru diketahui apa akar

masalah. Selanjutnya, setelah ditemukan akar masalah, CM pun mengkomunikasikan kembali pada pihak terkait untuk ditindaklanjuti," Sebagaimana diketahui, PPA, atau Profesional Pemberi Asuhan terdiri dari tiga kelompok besar, yakni dokter, perawat dan penunjang (apoteker, fisioterapi, ahli gizi, rekam medik, dll).

Sebagai pendamping pasien, CM adalah guide sebagai wujud pasien centered care, fasilitator serta pemberi advokasi dan edukasi. "Karena itu, keberadaan CM amat penting

3. Pendaftaran Online Via WhatsApp/ WA

Saat ini pasien bisa mendaftar via WhatsApp tanpa harus datang ke RS. Hal ini memudahkan masyarakat tanpa harus antri panjang di loket pendaftaran. Jika pasien sibuk dan tidak punya waktu buat antri, silakan lakukan registrasi untuk berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir (RSMN) via whatsapp ke nomor 0822 8621 1725.

"Ini adalah upaya kami untuk mempercepat proses registrasi. Ya, dalam rangka melayani masyarakat. Meningkatkan kepuasan pelanggan,"

Sebagai rumah sakit rujukan tipe B, yang melayani pasien untuk wilayah Sumbar bagian selatan, RSMN adalah pilihan satu-satunya. Apalagi dengan prinsip pelayanan rujukan berjenjang yang diterapkan BPJS, maka RSMN adalah pilihan buat rujukan RST Solok, RSUD Dharmasraya, RSUD Sijunjung, RSUD Sawahlunto, RSUD Arosuka dan RSUD Muara Labuh.

Terkait registrasi online itu adalah untuk mengurangi waktu tunggu pasien di loket pendaftaran rawat jalan.

Untuk pengembangan ke depan, "Rencananya kita akan buka pendaftaran 24 jam. Untuk saat ini hanya bisa dibuka dari pukul 8.00 sampai pukul 13.00 WIB. Manfaat khusus untuk, semua sistem pengelolaan rekam medik berbasis elektronik nantinya. Jadi kita tidak repot dengan tumpukan kertas lagi.

Proses pengolahan data lebih mudah, dan akses permintaan data pun lebih cepat," ujarnya.

Layanan registrasi elektronik tidak hanya via whatsapp, untuk pasien yang datang ke loket pun dapat memanfaatkan aplikasi Spiderman. "Spiderman adalah anjungan pendaftaran mandiri, untuk memudahkan pasien menginput data saat registrasi,"

Dalam hal menggunakan whatsapp dengan nomor 0822 8621 1725, ini cara pendaftarannya:

1. Dilakukan sehari sebelum kunjungan
2. Pendaftaran ini TIDAK BISA untuk klinik JANTUNG, MATA, REHAB MEDIK
3. Kirim foto melalui WA
 - * Kartu BPJS
 - * KTP/KK
 - * Kartu Berobat Ulang
 - * Lembar Kontrol (Bagi Pasien Ulangan)
4. Tunggu pesan konfirmasi

Gambar 20
Prosedur Pendaftaran Via WhatsApp/ WA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR
Jl. Sempang, Kecamatan Koba Solok, Telp: (0757) 33000, Faks: (0757) 30001
 Website: www.rsdmoammohammadnatsir.go.id, email: rsud.mohammadnatsir@prov.sumsbar.go.id

PENDAFTARAN ONLINE PASIEN
LAJUR JALAN VIA APLIKASI WHATSAAPP

**NOMOR WHATSAPP RSUD
M.NATSIR Solok**
082286211725

TANPA ANTRI !!!
***Cepat *Mudah**
***Efisien *Efektif**

CARA PENDAFTARAN via Whatsapp :

1. Add nomor whatsapp (simpan) pendaftaran WHATSAPP RSUD M.Natsir Solok 082286211725
2. Ketik pesan atau kirim foto :
 - Kartu BPJS
 - KTP/NIK
 - Kartu berobat ulang
 - Lembar kontrol ulang atau resume
3. Mendapat pesan balasan
 - Yang berisi nomor urut antrian
4. Datang ke loket "1"
 - Datang beloket 1 (satu) pada hari kunjungan, untuk konfirmasi kedatangan

SYARAT PENDAFTARAN :

1. Kartu BPJS
2. Surat kontrol atau resume (bagi pasien wajib kontrol)
3. Foto copy ktp atau kk
4. Persyaratan yang dibawa mahan diserahkan kepada petugas
5. Tanggal berobat harus sesuai tanggal kontrol bagi pasien kontrol ulang

KETENTUAN PENDAFTARAN :

1. Pendaftaran pasien online via whatsapp dilakukan h-1 sebelum berobat
2. Pendaftaran dilakukan dari jam 08.00 – 13.00 wib

CATATAN: tidak bisa untuk Angeti, Jantung, Mata dan Rehab Medik yang melakukan sidi jari



- ❖ Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan paripurna
- ❖ Sertan dalam melayani, cepat dan tepat dalam bertindak

CS Scanned with CamScanner

b. Akreditasi Rumah Sakit

Nilai akreditasi Rumah Sakit adalah hasil penilaian dari Tim Komite Akreditasi Rumah Sakit/KARS. Nilai hasil survey berjenjang dari Tingkat Dasar sampai paripurna . Jika nilai Madya apabila 8 – 11 bab mendapat nilai 80%, sedangkan nilai Utama jika dari 15 Bab yg disurvey, 2 bab 60% dan 80%, sedangkan nilai Paripurna jika 15 Bab di atas 80%

Tabel
Capaian Indikator Kinerja 2

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN TAHUN 2020	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2	Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna (80)	Paripurna (80)	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2020 adalah Paripurna dengan persentase capaian 100%. Jika dibandingkan dengan target Tahun ini (2019) yaitu Paripurna capaian ini sudah **sangat baik**.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun lalu yaitu Paripurna capaian tahun ini tetap dapat mempertahankan Predikat Paripurna.

Berikut capaian Akreditasi RSUD Solok dari Tahun 2016-2019;

Tabel
Predikat Akreditasi RSUD Mohammad Natsir
Tahun 2018-2021

Tahun	Akreditasi	
	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2018	Paripurna	100
2019	Paripurna	100
2020	Paripurna	100
2021	Paripurna	100

Sumber Data : Laporan Tim Akreditasi

Penilaian Akreditasi Versi 2012 RSUD Mohammad Natsir baru dimulai pada Tahun 2016. Sebelumnya Akreditasi RSUD Mohammad Natsir masih menggunakan Standar lama, yaitu Lulus Akreditasi Tingkat Dasar pada Tahun 2005 dan Lulus Akreditasi 16 Pelayanan pada Tahun 2011. Persentase Capaian Akreditasi RSUD Mohammad Natsir dari Tahun 2016 - 2019 sudah 100%.

Tabel
Capaian Indikator Kinerja 2
Dibanding Target Jangka Menengah (2021)

INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH (2021)	TAHUN 2021	
		REALISASI	% CAPAIAN
1 Akreditasi	Paripurna	Paripurna	100%

Kalau kita lihat dari target jangka menengah pada Renstra RSUD Mohammad Natsir Tahun 2016-2021, maka capaian pada tahun kedua (2017) sudah sesuai dengan target akhir masa Renstra (2021) yaitu Paripurna.

Jika dibandingkan dengan Standar nasional. Akreditasi tertinggi saat ini berstatus Paripurna. Maka Realisasi Capaian Akreditasi RSUD Mohammad Natsir Tahun 2019 (Paripurna) sudah sesuai dengan standar nasional.

Analisa dari pencapaian target kinerja ini dari segi Program dan Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Predikat Paripurna adalah :

- a. Sosialisasi akreditasi versi baru tahun 2012 (dinkes provinsi sumatera barat).
- b. Pelatihan/ workshop akreditasi versi baru jci sebanyak 8 orang yang dilakukan di jakarta, bandung dan bogor.
- c. Workshop akreditasi versi baru tahun 2012 di rsud Mohammad Natsir

oleh tim kars jakarta yang difasilitasi oleh dinas kesehatan provinsi sumatera barat

- d. Pembentukan pokja akreditasi yang terdiri dari 15 pokja
- e. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung
- f. Sosialisasi akreditasi versi baru tahun 2012 secara internal
- a. Sosialisasi akreditasi versi baru tahun 2012 terhadap karyawan rsud Mohammad Natsir
- b. Pembimbingan internal akreditasi untuk pembuatan dokumen pembuatan dokumen akreditasi
- c. Persiapan dokumen .

Sasaran 2: Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit

**Tabel
Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 3**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2019	TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	%
3	Meningkatnya Tata Kelola RS	4 Nilai Evaluasi SAKIP	69(BB)	A (81)	A(80,01)	

Nilai Evaluasi SAKIP

Nilai Evaluasi SAKIP adalah nilai capaian dari Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dinilai dengan berpedoman pada Kepmenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKI

Kalau kita lihat dari target jangka menengah pada Renstra RSUD Mohammad Natsir Tahun 2016-2021, maka capaian pada tahun ini (2020) belum mencapai target masa akhir Renstra yaitu 80(A).

Jika dibandingkan dengan Standar nasional, nilai Evaluasi Sakip yang diharapkan itu adalah AA.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Nilai Evaluasi SAKIP adalah:

- a. Pembahasan bersama Sistem AKIP di seluruh manajemen
- b. Pembelajaran dari rekomendasi Nilai tahun sebelumnya
- c. Mengadakan konsultasi kebagian terkait.

Sasaran 3: Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit

Tabel 38
Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
3	Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit	4 Tingkat Kemandirian Keuangan	75%	50,2%	

Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)

Indikator ini berguna untuk menilai kemampuan rumah sakit untuk menanggung seluruh beban biaya yang dikeluarkan rumah sakit, baik berupa biaya operasional maupun belanja modal pengembangan rumah sakit (TKK). Semakin tinggi kemampuan rumah sakit untuk membiayai seluruh belanjanya, maka semakin baik kinerja rumah sakit tersebut.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian TKK RSUD Mohammad Natsir tahun 2021 adalah 50,2 %, sedangkan target tahun 2020 adalah 55% Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi

penurunan disebabkan karena pada tahun 2021 terjadi peningkatan Belanja Modal guna mencukupi standar sarana dan prasarana rumah sakit dan penurunan pendapatan akibat dari pemberlakuan sistem rujukan online BPJS.

Jika dibandingkan dengan standar nasional Rumah Sakit BLUD menurut Kemedagri, RS BLUD sudah harus mampu membiayai seluruh belanja yang dikeluarkan dari pendapatan sendiri. Artinya TKK RS BLUD diharapkan bisa mencapai 100%.

REALISASI PROGRAM PELAYANAN RUMAH SAKIT

Realisasi Fisik dan Keuangan

1. PENDAPATAN

REALISASI PENDAPATAN RSUD MOHAMMAD NATSIR
TAHUN 2021

Tabel 1
REALISASI PENDAPATAN RSUD MOHAMMAD NATSIR
TAHUN 2021

NO	NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI		
			Fisik	Keuangan	
			%	Rp	%
A	PENDAPATAN	90.183.164.793	100	63.539.150.777	70,45

Pada Tahun 2021, RSUD Mohammad Natsir merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Rumah Sakit (APBD Perubahan)

sebesar Rp. 90.183.164.793 yang bersumber dari Pendapatan BLUD (Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah).

Realisasi Pendapatan RS Tahun 2021 sebesar Rp. 63.539.150.777,-atau 70,45 % dari target yang direncanakan.

2. BELANJA RUMAH SAKIT

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD RSUD MOHAMMAD NATSIR TAHUN 2021

NO	NAMA KEGIATAN	DANA/ TARGET (Rp)	REALISASI		
			Fisik	Keuangan	
			%	Rp	%
B	BELANJA	157.513.927.667	100	121.869.847.483	77,37
	APBD	15.436.477.177	100	7.313.000.234	47,37
I.I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	37.702.361.168	100	37.523.616.198	99,52
	Belanja Gaji dan Tunjangan	28.196.902.798	100	28.030.064.836	99,40
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	9.505.458.370	100	9.493.551.362	99,87
I.II	BELANJA LANGSUNG	14.191.924.529	100	13.494.080.274	95,08
II.I	PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS	14.191.924.529	100	13.494.080.274	95,08
	Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK)	10.330.487.529	100	9.826.616.074	95,12
	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	3.861.437.000	100	3.667.464.200	94,98
II.II	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	90.183.164.793	100	63.539.150.777	70,46

Pelayanan BLUD RSUD	90.183.164.793	100	63.539.150.777	70,46
---------------------	----------------	-----	----------------	-------

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi fisik untuk seluruh kegiatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung sudah mencapai 100%. Sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar 77,37%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan tidak mencapai target dikarenakan menurunnya jumlah kunjungan pasien dan rendahnya kasus Covid 19 yang mempengaruhi pendapatan covid-19

Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2021 adalah belanja gaji dan tunjangan tambahan penghasilan PNS yang mana realisasi keuangannya mencapai 99,52%. Pada tahun 2021 jumlah PNS RSUD Mohammad Natsir adalah berjumlah sebanyak 437 orang. Sementara itu dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) sendiri diberlakukan sistem on-off untuk tenaga BLUD, hal ini bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber dana.

Realisasi Belanja Langsung pada tahun 2021 terdiri dari 2 program;

1. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS, dengan keluaran : terpenuhinya standar sarana dan prasarana RS
realisasi keuangan : Rp. 13.494.080.274 (95,08%)
dengan kegiatan;
 - a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Medis Kedokteran Umum Bedah dan Penunjang lainnya (DAK)
Keluaran : 4 Paket
Realisasi keuangan : Rp. 9.826.616.074,- (95,12%)
 - b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
Keluaran : 2 Paket (Instalasi Pengolahan Limbah dan Instalasi Pengadaan Air Bersih)
Realisasi Keuangan : Rp. 3.667.464.200,- (94,98%)
2. Program Peningkatan Pelayanan BLUD
 - a. Kegiatan Pelayanan BLUD RSUD

Hasil yang didapatkan dari Program dan Kegiatan RSUD Mohammad Natsir tahun 2021 adalah;

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Hasil yang dicapai adalah: Terpenuhinya jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai standar Rumah Sakit Tipe B, dengan terpenuhinya sarana dan prasarana Rumah Sakit diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.

Pada tahun 2021 RSUD Mohammad Natsir telah melakukan penambahan Alat Kesehatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan berupa (Instalasi Pengolahan Limbah dan Instalasi Pengadaan Air Bersih).

2. Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Untuk Kegiatan Pelayanan BLUD lebih banyak pada kegiatan rutin dan pemeliharaan, seperti gaji tenaga kontrak BLUD, gaji karyawan outsourcing, belanja obat dan alat kesehatan habis pakai.

Namun selain belanja rutin dan pemeliharaan, kegiatan BLUD juga menganggarkan Belanja Modal yang di antaranya di tahun 2021 terdapat Belanja Modal untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien.

3.4. KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Dalam penyelenggaraan pola pelayanan keuangan Badan Layanan Umum, RSUD M.Natsir Solok sudah mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal UU tentang lingkungan Hidup, RSUD M.Natsir Solok telah mendapatkan predikat baik untuk pengelolaan limbah rumah sakit. Dalam Pengelolaan keuangan BLUD rumah sakit telah disusun berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas sehingga untuk penyelenggaraan biaya operasional rumah sakit sudah murni menggunakan dana BLUD. Dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat agar sesuai dengan UU kedokteran dan UU Kesehatan, RSUD M.Natsir Solok telah melakukan penilaian kualitas pelayanan melalui Akreditasi yang dilakukan oleh Tim KARS Kementerian Kesehatan RI dengan hasil nilai PARIPURNA

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa selama tahun 2020 juga sudah sesuai dengan ketentuan Perpres no 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Jenjang Nilai Pengadaan di RS BLUD.

3.5 .TINDAK LANJUT ATAS HASIL PENGAWASAN SEBELUMNYA

Terdapat beberapa tindak lanjut dari hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD antara lain :

Terdapat beberapa upaya dari RSUD Solok untuk menindaklanjuti tentang hasil pengawasan yang dilakukan yang sudah ditindaklanjuti antara lain :

1. Melakukan optimalisasi peran dan fungsi dari Satuan Pengawas Internal (SPI) dengan cara membentuk SK TIM SPI serta rincian tugas yang jelas serta memberikan tugas tim untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.
2. Melakukan efisiensi ketenagaan terutama tenaga BLUD dan outsourcing agar belanja operasional BLUD bisa ditekan mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia
3. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap gedung OK central yang sudah dilakukan audit oleh BPK RI serta mengalokasikan usulan pembangunan lanjutan untuk gedung tersebut agar bisa dimanfaatkan secepatnya untuk pelayanan kepada pasien terutama dimasa pandemic covid 19 ini
4. Menindaklanjuti pemanfaatan terhadap alat- alat kesehatan yang sudah dibeli melalui dana DAK dan dana APBD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021 agar bisa dimanfaatkan bagi pelayanan pasien termasuk layanan covid 19

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab IV Beris :

- 4 *Kesimpulan*
- 5 *Rekomendasi*

4.1 Kesimpulan

1. Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD M.Natsir Solok cukup baik dengan nilai 91,89 % melebihi target 85 %, namun masih perlu ditingkatkan terutama dari kecepatan dan ketepatan layanan yang diberikan
2. Penilaian SAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Solok yang dilakukan oleh Inspektorat Propinsi Sumatera Barat bisa mempertahankan nilai A(80,01) bahkan nilai skornya mengalami peningkatan menjadi A (80,09) dan ini harus tetap dipertahankan untuk tahun berikutnya.
3. RSUD M. Natsir akan dikembangkan dengan pola kerjasama dengan pihak ketiga yaitu KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha)
4. RSUD M.Natsir Solok mendapatkan penilaian Akreditasi Paripurna dari TIM KARS Kemenkes RI, dan predikat ini akan dievaluasi setiap tahun sehingga perlu peningkatan aspek pelayanan, ketenagaan dan sarana prasarana yang memadai untuk tetap sebagai RS yang terakreditasi.
5. Tingkat Kemandirian keuangan RSUD M.Natsir masih rendah di angka 50,5 % dari target yang ditetapkan 80 % sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan tatakelola keuangan yang lebih efektif dan efisien.
6. Dimasa pandemi Covid 19 yang masih terjadi tahun 2021 , RSUD M.Natsir Solok mengalami kesulitan keuangan terutamanya sisi penerimaan retribusi layanan kesehatan dan meningkatnya biaya- biaya dari sisi operasional akibat dampak penurunan jumlah pasien, sehingga perlu dilakukan inovasi pelayanan

7. Masih kurangnya ketersediaan terutama obat – obatan, bahan medis habis pakai serta Alat pelindung diri (APD) bagi petugas rumah Sakit yang melayani pasien Covid 19 yang semakin meningkat
8. RSUD M.Natsir Solok masih perlu ditambah dari aspek standar peralatan medis terutama alat kesehatan untuk pencegahan dan penanganan Covid 19 agar sesuai dengan standar rumah sakit rujukan regional di wilayah Sumatera Barat bagian Selatan
9. RSUD M. Natsir Solok masih belum optimal dalam Proses penyusunan dan evaluasi rencana strategis Bisnis
10. Proses penyusunan dan evaluasi Rencana Bisnis Anggaran belum optimal
11. Dokumen Rencana Bisnis Anggaran belum memenuhi seluruh kebutuhan unit pelayanan yang ada sesuai dengan permenkes RI
12. RSUD M. Natsir Solok Masih terbatas dari aspek jumlah SDM medis, paramedis dan penunjang lainnya sehingga pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat belum optimal terutama kurangnya tenaga perawat.
13. Terbatasnya jumlah sarana-prasarana dan peralatan medis yang dibutuhkan dalam pelayanan dokter terutama pada dokter spesialis dan dokter sub spesialis.

4.2 Rekomendasi

1. Pihak Direksi agar tetap mempedomani hasil Indeks Kepuasan masyarakat dalam menyusun program dan kegiatan kedepannya sehingga masyarakat yang dilayani tetap memperoleh pelayanan yang memuaskan dan sesuai standar akreditasi.
2. Nilai Sakip A yang diterima oleh rumah sakit perlu diapresiasi dan agar lebih ditingkatkan lagi pada masa – masa berikutnya.
3. Dalam mengembangkan rumah sakit agar dibuat pilihan kerjasama apakah melalui KPBU atau melalui pinjaman pada pihak perbankan

4. Pihak direksi perlu melakukan kajian dan upaya tindakan efektifitas dan efisiensi terhadap keseluruhan belanja BLUD agar tidak terjadi kesulitan pembiayaan operasional rumah sakit
5. RSUD M.Natsir Solok harus segera memenuhi rekomendasi dari TIM KARS terhadap indikator dan parameter yang perlu dipenuhi dan diperbaiki untuk peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit.
6. Untuk meningkatkan kemandirian rumah sakit, Pihak direksi agar melakukan inovasi pendapatan berupa kerjasama operasinal dengan pihak ketiga serta melakukan efisiensi terhadap belanja-belanja operasional.
7. Untuk penambahan sarana prasarana, dan mengingat keterbatasan anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat agar pihak direksi mengajukan usulan anggaran ke berbagai pihak seperti kementrian kesehatan dan kementrian keuangan serta sumber – sumber lain yang sah.
8. Sebagai RS Rujukan regional, RSUD M. Natsir Solok harus mengusulkan pemenuhan standar peralatan kesehatan sesuai dengan Permenkes no 56 tahun 2013 melalui dana APBD maupun APBN
9. Untuk penyempurnaan penyusunan dokumen RBS agar dilakukan penyempurnaan mekanisme pelibatan seluruh unit terkait dengan melalui pembahasan terpadu melalui pembentukan Tim Anggaran Rumah sakit
10. Pembahasan rincian RBA agar melibatkan seluruh unit terkait untuk terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan dan anggaran antara bagian dan unit terkait melalui pembentukan Tim Anggaran Rumah Sakit
11. Penyusunan dokumen RBA agar mengacu kepada Permenkes yang mengharuskan penyusunan RBA dengan berdasarkan unit layanan yang ada pada rumah sakit BLUD
12. Kekurangan tenaga medis, paramedis dan tenaga penunjang lainnya dapat dilakukan penambahan dengan seleksi tenaga BLUD dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kecukupan anggaran
13. Untuk mengatasi kekurangan sarana prasarana, pejabat pengelola BLUD dapat melakukan berbagai upaya seperti kerjasama operasional dengan distributor peralatan medis atau membuat usulan prioritas pembangunan

gedung melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat maupun dana Kementerian Kesehatan RI

14. Untuk peningkatan pelayanan dimasa pandemi Covid 19, pihak direksi agar mengajukan usulan pemenuhan kebutuhan obat, bahan medis habis pakai serta alat – alat kesehatan penanganan covid melalui sumber dana BTT Pemprov Sumatera Barat